

Ringkasan Pembaruan

RENCANA PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU

Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045

Land4Lives

In partnership with Canada

LANDSCAPE ALLIANCE
CIFOR & ICRAF in action

Ringkasan Pembaruan

RENCANA PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU

Provinsi Sumatera Selatan
2025-2045

Penyusun:
Tim Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Tim Teknis:
Tania Benita
Seruni Fauzia Lestari
Ira Ratna Sari
Harry Aksomo
Anugerah Yuliadi
David Susanto
Hikmah Fajar Assidiq
Faza Iza Mahezs
Muhammad Wisnu Haryanto
Iman Sumantri
Muhammad Fikri Fadhillah
Rahayu Subekti
Fitri Marulani
Dikdik Permadi
Hasna Afifah
Dewi Kiswani Bodro
Muhammad Naufal
Thifali Adzani
Nurhayatun Nafsiyah
Fajrina Magfiroh
Novia Caecilia Yulita
Oktariansyah Ade Prayama
Ni'matul Khasanah
Feri Johana
Andree Ekadinata

Daftar Isi

Daftar Isi iii
Kata Pengantar Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan vii
Kata Pengantar Direktur ICRAF Program Indonesia x
Daftar Singkatan xii
Daftar Istilah xiii
Pendahuluan 1
1.1 Sekilas GGP 2017-2030 2
1.2 Latar Belakang 4
1.3 Pendekatan yang Digunakan 7
1.4 Metodologi 8
Peluang dan Tantangan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan Saat Ini dan Masa yang Akan Datang 11
2.1 Peluang 11
2.2 Tantangan 11
Rumusan Pembaruan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan 13
3.1 Pengembangan Skenario Pertumbuhan Ekonomi Hijau 13
3.2 Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau 14
Perkiraan Dampak Terhadap Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau 17
4.1 Perubahan tutupan lahan historis dan proyeksi 18
4.2 Pertumbuhan ekonomi (proyeksi PDRB skenario BAU vs GGP) 21
4.3 Emisi dan sekuestrasi GRK (proyeksi skenario BAU vs GGP) 27
4.4 Kehati 32
4.5 Biofisik 33
4.6 Sosial-Ekonomi 37
Intervensi Keruangan Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau 39
5.1 Dasar pemilihan lokasi 39
5.2 Prioritas lanskap dan komoditas 39
5.3 Aturan penapisan dan pemetaan 39
5.4 Penghubung prioritas dengan rencana kerja 40
5.5 Peta Intervensi 40

Penutup **43**
6.1 Pengorganisasian pelaksanaan 43
6.2 Tahapan pelaksanaan hingga 2045 43
6.3 Pembiayaan dan kelayakan investasi 44
6.4 Pemantauan dan evaluasi 44
6.5 Tindak lanjut prioritas 44
Daftar Pustaka **45**
Lampiran-1. Strategi, Intervensi, dan Indikator **48**

Daftar Gambar

Gambar 1. Kontribusi dan laju pertumbuhan PDRB Sumatera Selatan dibandingkan dengan Provinsi Lain di Indonesia pada periode 2015-2025 5
Gambar 2. PDRB Sumatera Selatan 2010-2015 berdasarkan lapangan usaha (triliun rupiah) 5
Gambar 3. Proyeksi luas penutupan hutan dengan skenario BAU dan GGP (2025-2045) 18
Gambar 4. Proyeksi persentase tutupan pohon dengan skenario BAU dan GGP (2025-2045) 18
Gambar 5. Proyeksi persentase agroforestri dengan skenario BAU dan GGP (2025-2045) 19
Gambar 6. Proyeksi Penggunaan Lahan Provinsi Sumatera Selatan; (a) Skenario BAU, (b) Skenario GGP (2020-2045) 20
Gambar 7. Proyeksi PDRB seluruh sektor dengan skenario BAU dan GGP (2025-2045) 21
Gambar 8. Proyeksi rerata pertumbuhan ekonomi dengan skenario BAU dan GGP 22
Gambar 9. Proyeksi PDRB sektor lahan dengan skenario BAU dan GGP 23
Gambar 10. Proyeksi pendapatan per kapita dengan skenario BAU dan GGP (2025-2045) 23
Gambar 11. Proyeksi serapan tenaga kerja dengan skenario BAU dan GGP (2025-2045) 24
Gambar 12. Proyeksi keuntungan usaha dengan skenario BAU dan GGP (2025-2045) 25
Gambar 13. Proyeksi Keuntungan Usaha Tani dengan skenario BAU dan GGP (2025-2045) 25
Gambar 14. Proyeksi keterkaitan kedepan sektor SDA dengan skenario BAU dan GGP (2025-2045) 27

Gambar 15. Proyeksi Emisi (Nett ton CO2 eq) dari Perubahan Penggunaan Lahan (2020-2045) 27
Gambar 16. Proyeksi Emisi (Nett ton CO2 eq) dari Dekomposisi Gambut (2020-2045) 28
Gambar 17. Proyeksi serapan karbon (Nett ton CO2 eq) Provinsi Sumatera Selatan (2020-2045) 29
Gambar 18. Proyeksi emisi bersih (Nett ton CO2 eq) Provinsi Sumatera Selatan (2020-2045) 30
Gambar 19. Proyeksi intensitas emisi dengan skenario BAU dan GGP (2025-2045) 31
Gambar 20. Proyeksi nilai DIFA dengan skenario BAU dan GGP (2025-2045) 32
Gambar 21. Proyeksi perubahan Total Edge Contrast Index tahun 2025-2045 melalui dua skenario: BAU (kiri) dan GGP (kanan) 32
Gambar 22. Laju erosi (kiri) dan akumulasi kehilangan tanah (kanan) 33
Gambar 23. Sebaran laju erosi tahun 2025, skenario BAU dan GGP 34
Gambar 24. Laju sedimentasi skenario BAU dan GGP 35
Gambar 25. Peta sebaran sedimentasi tahun 2025 35
Gambar 26. Peta Sebaran Titik Kejadian Kebakaran Periode 2020–2025 (kiri) dan Peta Kerawanan Kebakaran Historis Periode 2020-2025 (kanan) 36
Gambar 27. Persentase Area dengan Kerawanan Tinggi (atas) dan Peta Proyeksi Kerawanan Kebakaran Hingga Tahun 2045 (bawah). 37
Gambar 28. Proyeksi nilai penguasaan lahan masyarakat dengan skenario BAU dan GGP (2025-2045) 38
Gambar 29. Area kelola masyarakat di Sumatera Selatan 40
Gambar 30. Peta Intervensi 41

Daftar Tabel

Tabel 1. Perbandingan Proyeksi Indikator Makro dari Skenario BAU dan Pertumbuhan Ekonomi Hijau 2017-2030 3
Tabel 2. Pokok hasil simulasi Masterplan 2017–2030 sebagai dasar pembaruan 4
Tabel 3. Indikator Makro yang Digunakan dalam Ringkasan Teknis GGP Sumatera Selatan 8
Tabel 4. Definisi dan asumsi yang digunakan dalam skenario BAU dan GGP 13



© Landscape Alliance

Kata Pengantar
Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan *Update* Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan dapat diselesaikan. Dokumen ini merupakan hasil kolaborasi dan komitmen bersama berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi daerah yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat ketahanan iklim, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Penerapan ekonomi hijau merupakan salah satu arah kebijakan transformasi ekonomi nasional dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Transformasi ini menuntut perubahan paradigma pembangunan menuju pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien, pengurangan emisi, pengembangan energi bersih, penerapan ekonomi sirkular, serta penguatan investasi dan pembiayaan hijau. Prinsip ekonomi hijau juga perlu diintegrasikan ke dalam seluruh sektor pembangunan agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Bagi Provinsi Sumatera Selatan, agenda pertumbuhan ekonomi hijau memiliki arti strategis mengingat besarnya potensi sumber daya alam dan peran provinsi ini dalam mendukung ketahanan pangan dan energi nasional. Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan energi



merupakan bagian penting dari perekonomian daerah sekaligus memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan ekosistem. Komoditas unggulan seperti karet, kelapa sawit, kopi, dan padi memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan penghidupan masyarakat. Namun, pengelolaannya juga menghadapi tantangan berupa tekanan alih fungsi lahan, deforestasi, degradasi ekosistem gambut, kebakaran hutan dan lahan, serta meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim. Kondisi ini menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang mampu menyelaraskan peningkatan produktivitas ekonomi dengan perlindungan hutan, pemulihan gambut, pengelolaan sumber daya air, dan penguatan ketahanan penghidupan masyarakat.

Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengarusutamakan pertumbuhan ekonomi hijau telah tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2045 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024. Dokumen tersebut menempatkan pertumbuhan ekonomi hijau sebagai bagian dari arah pembangunan wilayah, antara lain melalui pengembangan produksi pertanian dan kehutanan berkelanjutan, perlindungan dan pemulihan hutan serta gambut, penurunan emisi, penguatan kemitraan multipihak, dan penyelarasan perencanaan pembangunan dengan tata ruang serta daya dukung lingkungan. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, penyusunan dan pembaruan Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau menjadi langkah strategis untuk menerjemahkan visi pembangunan jangka panjang ke dalam strategi, intervensi, dan indikasi program yang lebih operasional, terukur, dan terintegrasi lintas sektor.

Penyusunan dokumen ini diharapkan dapat memperkuat keterpaduan perencanaan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan karakteristik bentang lahan, potensi ekonomi, kondisi sosial, dan kerentanan ekologis di berbagai wilayah Sumatera Selatan. Pendekatan bentang lahan memungkinkan identifikasi intervensi yang lebih tepat sasaran, mulai dari peningkatan produktivitas komoditas secara berkelanjutan, pengembangan agroforestri, perlindungan kawasan hutan, restorasi gambut, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, hingga penguatan rantai nilai dan diversifikasi sumber penghidupan masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi hijau tidak hanya dipahami sebagai upaya mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai peluang untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru, meningkatkan daya saing daerah, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau tidak dapat dicapai oleh pemerintah daerah semata. Diperlukan sinergi yang kuat antara perangkat daerah, pemerintah

kabupaten, dunia usaha, akademisi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, masyarakat lokal, serta mitra pembangunan. Oleh karena itu, dokumen ini diharapkan menjadi rujukan bersama dalam menyelaraskan kebijakan, program, pembiayaan, dan indikator kinerja pembangunan, sekaligus mendorong penguatan mekanisme koordinasi dan pemantauan pelaksanaan ekonomi hijau di Provinsi Sumatera Selatan.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini, termasuk tim teknis, para pemangku kepentingan daerah, serta ICRAF Indonesia dan mitra pembangunan lainnya yang telah memberikan dukungan dan masukan berharga. Semoga kolaborasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat dalam tahap implementasi, sehingga berbagai strategi dan intervensi yang dirumuskan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Akhir kata, kami berharap Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan dapat menjadi landasan strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang produktif, inklusif, tangguh terhadap perubahan iklim, dan berkelanjutan. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, kita optimistis dapat mengoptimalkan potensi Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan dan energi nasional sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam bagi generasi sekarang dan mendatang.

Kepala Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan

H. Dody Eko Prasetyo, S.T., M.T.

Kata Pengantar Direktur ICRAF Program Indonesia

Dengan penuh rasa syukur, kami menyampaikan apresiasi atas proses pembaruan Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth Plan/GGP*) Provinsi Sumatera Selatan. Pembaruan dokumen ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat arah pembangunan daerah yang selaras dengan visi pembangunan jangka panjang, sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan terhadap perubahan iklim.

ICRAF Indonesia merasa terhormat dapat memberikan dukungan teknis dalam proses analisis, pemutakhiran data, pengembangan strategi, serta fasilitasi kolaborasi multipihak yang menjadi bagian penting dari pembaruan dokumen ini. Melalui pendekatan bentang lahan yang berbasis sains dan bukti empiris, kami berupaya mendukung perumusan strategi dan intervensi yang mampu menjawab tantangan sekaligus mengoptimalkan potensi Sumatera Selatan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan energi nasional. Potensi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan sumber daya alam lainnya perlu dikelola secara berkelanjutan, dengan memperhatikan tantangan deforestasi, degradasi ekosistem gambut, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak perubahan iklim terhadap produktivitas dan penghidupan masyarakat.

Pembaruan GGP ini juga menjadi momentum untuk memperkuat keterkaitan antara agenda pertumbuhan ekonomi hijau dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan



2025–2045. Dengan menjabarkan arah kebijakan ke dalam strategi dan intervensi yang lebih operasional, dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi integrasi perencanaan lintas sektor, penyelarasan program dan pembiayaan, serta penguatan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat lokal. Kami meyakini bahwa pendekatan ini akan membuka peluang bagi pengembangan ekonomi yang lebih inklusif, penguatan rantai nilai komoditas lokal, pemulihan ekosistem, serta peningkatan ketahanan penghidupan masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan.

Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Bappeda, beserta seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan, pemikiran, dan komitmen selama proses pembaruan dokumen ini. Apresiasi juga kami sampaikan kepada Kementerian PPN/Bappenas, mitra pembangunan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam memperkuat agenda pertumbuhan ekonomi hijau di Sumatera Selatan.

Kami berharap pembaruan Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi panduan bersama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang produktif, rendah karbon, inklusif, dan tangguh terhadap perubahan iklim. Semoga kolaborasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat dan diterjemahkan menjadi aksi nyata untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan masa depan Sumatera Selatan yang hijau dan berkelanjutan.

Bogor, Oktober 2026

Direktur ICRAF Indonesia

Andree Ekadinata

Daftar Singkatan

RTRWP	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi adalah dokumen perencanaan tata ruang yang menjadi acuan alokasi dan tata guna lahan di tingkat provinsi.
GRK	Gas Rumah Kaca adalah gas di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca dan berkontribusi pada perubahan iklim (mis. CO2, CH4).
SDA	Sumber Daya Alam adalah modal penghidupan berupa aset alam (lahan, air, hutan, dsb.) yang menjadi unsur lokal dalam livelihood capital.
SDM	Sumber Daya Manusia adalah modal penghidupan berupa kapasitas dan keterampilan manusia sebagai unsur lokal dalam livelihood capital.
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto merupakan nilai tambah bruto yang dihasilkan dalam wilayah pada periode tertentu.
REDD+	Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (plus konservasi, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan cadangan karbon) — program/mekanisme global pemberian insentif untuk penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan.
UU 32/2009	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan dasar hukum mekanisme insentif dan disinsentif jasa lingkungan di Indonesia.
Bonn Challenge	Komitmen global untuk merestorasi lahan dan hutan terdegradasi dalam skala luas, yang menjadi acuan target restorasi lahan.
Tropical Landscape Bond	Salah satu mekanisme pendanaan inovatif berbasis obligasi untuk mendukung restorasi lahan dan pembangunan lanskap berkelanjutan di kawasan tropis.
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
KHG	Kesatuan Hidrologis Gambut sebagai unit pemahaman dan pengelolaan hidrologi gambut
UPPB	Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar atau bahan olah karet
MRV	Pengukuran, pelaporan, dan verifikasi
IYB	Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan; penggunaan mengikuti metode dan kesiapan data resmi
PJL	Pembayaran jasa lingkungan
GAP	Praktik pertanian yang baik
KUPS	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial

Daftar Istilah

Pertumbuhan Ekonomi Hijau	Pendekatan pembangunan ekonomi yang mengupayakan pertumbuhan pendapatan dan lapangan kerja sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan mengurangi emisi GRK.
Land requirement (kebutuhan lahan)	Kebutuhan akan lahan yang muncul dari berbagai kepentingan lokal, regional, maupun global.
Land availability (ketersediaan lahan)	Ketersediaan lahan pada suatu area yang dapat memenuhi kebutuhan lahan (land requirement).
Livelihood capital (modal penghidupan)	Aset yang mendukung penghidupan masyarakat, mencakup lima jenis modal: alam, fisik, finansial, sosial, dan sumber daya manusia.
Resilience (ketahanan)	Kemampuan masyarakat atau sistem untuk bertahan dan pulih dari tekanan/guncangan, misalnya fluktuasi harga dan musim.
Rantai nilai (*value chain*)	Rangkaian proses dari produksi bahan baku hingga produk sampai ke konsumen akhir, melibatkan petani, perantara/ pedagang, dan industri hilir.
Konektivitas	Keterhubungan antarwilayah (dalam provinsi, antarwilayah di Sumatera, maupun antarnegara) dalam arus perdagangan, tenaga kerja, dan produk.
Skala ekonomi (*economies of scale*)	Efisiensi biaya yang diperoleh seiring peningkatan volume produksi atau perdagangan akibat peningkatan konektivitas.
Restorasi lahan dan hutan	Upaya memulihkan fungsi ekologis hutan/lahan yang terdegradasi, termasuk revitalisasi penghidupan masyarakat di dalamnya.
Insentif dan disinsentif jasa lingkungan	Mekanisme penghargaan (insentif) atau sanksi (disinsentif) untuk mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Pendanaan inovatif	Skema pembiayaan baru/non konvensional (mis. Tropical Landscape Bond) untuk mendukung investasi hijau dan jasa lingkungan.



© Landscape Alliance

1

Pendahuluan

Ringkasan Arah Pembaruan

Pembaruan GGP Provinsi Sumatera Selatan mempertahankan tujuh strategi GGP 2017–2030 dan menajamkannya untuk pelaksanaan 2025–2045 melalui tiga prioritas. Pertama, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas rakyat pada lahan yang sesuai. Kedua, memulihkan fungsi hidrologi gambut, DAS, dan pesisir serta melindungi habitat. Ketiga, menghubungkan lokasi intervensi dengan kelembagaan, pembiayaan, serta pemantauan hasil yang terukur. Manfaat ekonomi tambahan dalam model belum cukup untuk menyatakan bahwa kehilangan hutan, emisi gambut, dan ketimpangan telah teratasi.

Perekonomian Sumatera Selatan bertumpu pada sumber daya alam, dengan keterkaitan yang kuat antara pertambangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, industri pengolahan, dan penghidupan masyarakat. RPJPD 2025–2045 mengidentifikasi ketergantungan pada sektor primer, terbatasnya hilirisasi, alih fungsi lahan dan gambut, serta kerentanan pangan dan air sebagai persoalan yang perlu ditangani secara terpadu. Pembaruan GGP karena itu diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya hayati yang disertai perlindungan modal alam dan pemerataan manfaat pembangunan.

Dalam kondisi *Business as Usual* (BAU) atau Bisnis Seperti Biasa pertumbuhan ekonomi dari sektor terbarukan berbasis lahan akan cenderung lebih lambat dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu. Hal ini dikarenakan kemungkinan ekspansi yang terbatas akibat penurunan ketersediaan lahan produktif. Secara umum, ekspansi kegiatan ekonomi dan pertumbuhan penduduk mendorong alih fungsi lahan. Sedangkan spesifik pada pengembangan sektor primer, penurunan produktivitas dan nilai tambah didorong oleh usia tanaman yang sudah tua, minimnya penerapan praktik usaha tani yang baik, dan rantai nilai yang belum terkelola secara optimal. Untuk mengoptimalkan potensi yang ada, arah pengembangan ke depan perlu dibangun berbasis sumber daya lokal melalui *resource-based industry* atau agroindustri yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Dokumen ini memperbarui arah operasional Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan 2017–2030 untuk horizon 2025–2045. Lima capaian dambaan dan tujuh strategi tetap menjadi kerangka utama, sebagaimana ditegaskan kembali dalam RPJPD 2025–2045 bagian 2.7.5. Pembaruan mencakup konteks pembangunan, penjelasan skenario dan hasil simulasi, prioritas keruangan, mekanisme pelaksanaan, serta matriks intervensi, aktivitas, dan indikator. Hasil pemodelan digunakan sebagai dasar membandingkan pilihan kebijakan, sedangkan target pelaksanaan ditetapkan melalui perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.

1.1 Sekilas GGP 2017-2030

Berlatar pada berbagai peluang pembangunan berkelanjutan dan signifikansi kontribusi sektor berbasis lahan pada penghidupan masyarakat Sumatera Selatan, Green Growth Plan atau Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan 2017-2030 memiliki visi untuk mewujudkan 1) Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, 2) Pertumbuhan yang inklusif dan merata, 3) Ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan, 4) Ekosistem sehat dan produktif dalam menyediakan jasa lingkungan, dan 5) Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Kelima visi ini diterjemahkan menjadi 7 (tujuh) strategi, yaitu:

1. Alokasi dan tataguna lahan berkelanjutan yang merupakan penyelarasan antara kebutuhan lahan dengan ketersediaan lahan.
2. Peningkatan akses masyarakat terhadap modal penghidupan (*livelihood capital*).
3. Peningkatan produktivitas dan diversifikasi.
4. Perbaikan rantai nilai dengan pembagian manfaat yang adil.
5. Peningkatan konektivitas dan skala ekonomi.
6. Restorasi lahan dan hutan yang mengalami degradasi fungsi.
7. Insentif jasa lingkungan dan pendanaan inovatif komoditas berkelanjutan.

Penyusunan dokumen GGP Sumatera Selatan bertumpu pada analisis sistem yang dimodelkan dengan berbagai skenario pembangunan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Terdapat 17 indikator makro pertumbuhan ekonomi hijau yang dianalisis dengan menggunakan perangkat LUMENS untuk menghasilkan simulasi dengan skenario *business-as-usual* (BAU) dan skenario pertumbuhan ekonomi hijau (GGP). Beberapa poin utama yang dihasilkan:

1. Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan diprediksi mampu menurunkan emisi GRK sebesar 22%, tanpa memperhitungkan emisi dari kebakaran. Hingga tahun 2030, emisi bersih di Hutan Produksi dengan skenario Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau diproyeksikan negatif atau terjadi sequestrasi yang lebih besar daripada emisi, sedangkan dari skenario BAU, Hutan Produksi masih menjadi sumber emisi terbesar.
2. PDRB tahun 2030 diproyeksikan meningkat sebesar 6,4% dibandingkan BAU. Laju pertumbuhan PDRB dari sektor berbasis lahan sampai 2030 adalah sebesar 1,9% per tahun.
3. Nilai PDRB diproyeksikan lebih tinggi pada skenario GGP (3-6.4% lebih tinggi dibandingkan dengan skenario BAU) jika disertai dengan peningkatan produktivitas, memperbaiki akses pasar, peningkatan skala ekonomi dan pembangunan fasilitas pengolahan. Hal ini disebabkan karena adanya efek pengganda (*multiplier effect*).

Tabel 1. *Perbandingan Proyeksi Indikator Makro dari Skenario BAU dan Pertumbuhan Ekonomi Hijau 2017-2030*

Indikator Makro	Bisnis Seperti Biasa					Pertumbuhan Hijau				
	2014	2018	2022	2026	2030	2014	2018	2022	2026	2030
PDRB (triliun Rupiah)	335,6	353,9	369,5	383,8	396,3	335,6	353,9	369,9	393,2	410,1
PDRB per Kapita (triliun Rupiah)	89,8	94,7	98,0	101,0	103,7	89,8	94,7	116,1	118,9	132,5
Serapan tenaga kerja (ribu orang)	346	529	534	539	543	346	529	664	668	675
Keuntungan usaha (triliun Rupiah)	227,6	241,4	253,0	263,7	273,0	227,6	241,4	253,4	263,3	265,9
Rasio pendapatan/ keuntungan	39%	39%	39%	38%	38%	39%	39%	46%	45%	50%
Rasio penguasaan lahan	21%	19%	18%	16%	14%	21%	19%	23%	26%	30%
Persentase agroforestri	6%	5%	5%	5%	5%	6%	5%	6%	6%	6%
Keterkaitan sektor dan indeks ekonomi regional tanpa unit	0,45	0,48	0,51	0,61	0,61	0,45	0,48	0,78	0,91	1,21
Penutupan hutan (juta ha/tahun)	52,8	39,0	27,6	20,8	16,6	52,8	39,0	13,9	13,4	0,5
Tutupan pohon (%)	83%	80%	78%	77%	76%	83%	80%	84%	86%	87%
Restorasi hutan (ribu ha)	672,2	–	–	–	965,4	672,2	–	–	–	–
Indeks persistensi degradasi rendah tanpa unit (ha/ tahun)	0,65	–	–	–	0,71	0,65	–	–	–	–
Derajat integritas area hutan dengan unit tanpa skala (%)	3,38	3,42	3,27	3,16	3,05	3,38	3,42	3,53	3,48	3,41
Keberlanjutan wilayah (%)	25%	–	–	–	35%	25%	–	–	–	28%
Emisi sektor bisnis (Juta Ton CO_2)	25,2	32,8	25,5	21,2	17,3	25,2	32,8	16,1	14,4	13,2
Emisi lingkungan (Juta Ton CO_2)	12,9	18,4	18,9	19,3	15,7	12,9	18,4	11,3	9,6	8,0
Serapan karbon (Juta Ton CO_2)	10,7	5,7	6,5	7,0	5,8	12,7	5,7	1,9	8,1	7,4

Angka 22% dan 6,4% di atas merupakan hasil pemodelan dalam Masterplan 2017–2030, bukan capaian teramati. Angka tersebut tidak dibandingkan langsung dengan hasil 2025–2045 karena periode, kondisi awal, batas perhitungan, dan paket intervensinya berbeda.

Tabel 2. *Pokok hasil simulasi Masterplan 2017–2030 sebagai dasar pembaruan*

Ukuran pembanding	Hasil pemodelan Masterplan 2017–2030	Makna untuk pembaruan
Emisi GRK	22% lebih rendah daripada BAU; emisi kebakaran tidak diperhitung-kan.	Pertahankan pemisahan sumber emisi dan batas perhitungan.
PDRB pada 2030	6,4% lebih tinggi daripada BAU ketika produktivitas dan hilirisasi dipadukan.	Penataan lahan perlu disertai produktivitas dan nilai tambah.
Paket strategi	Tujuh strategi dan program tematik karet, kemitraan tanaman kehidupan, serta kopi.	Perbarui lokasi, pembiayaan, perlindungan sosial, dan ukuran hasil.

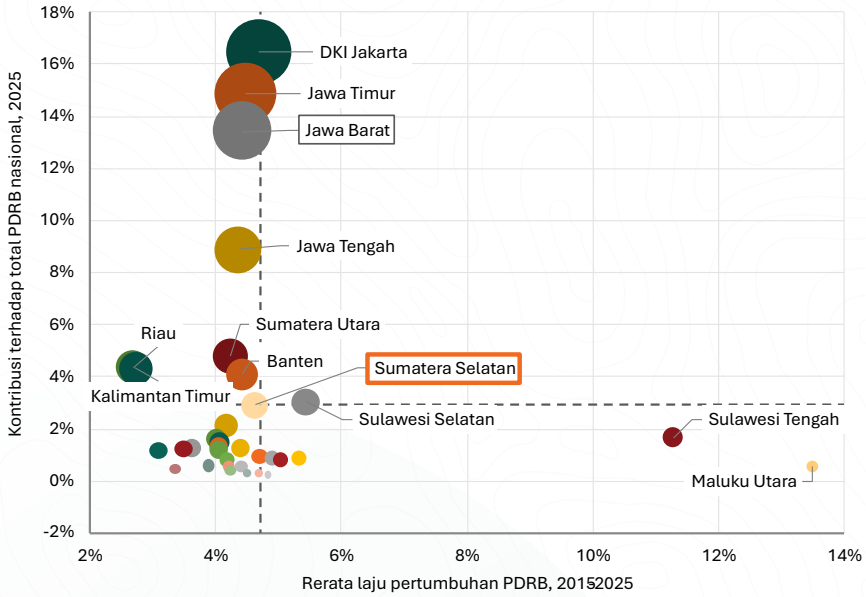
GGP Sumatera Selatan 2017-2030 menyertakan 3 (tiga) program tematik komoditas unggulan yang didalamnya mencakup model bisnis, biaya komponen dan sistem monitoring dan evaluasi. Ketiga program tersebut mencakup: (i) program peningkatan rantai nilai komoditas karet, (ii) program penguatan kemitraan HTI di Zona Tanaman Kehidupan, dan (iii) program pengembangan kopi *specialty* bersertifikasi prinsip berkelanjutan dan berdaya saing nasional dan internasional.

1.2 Latar Belakang

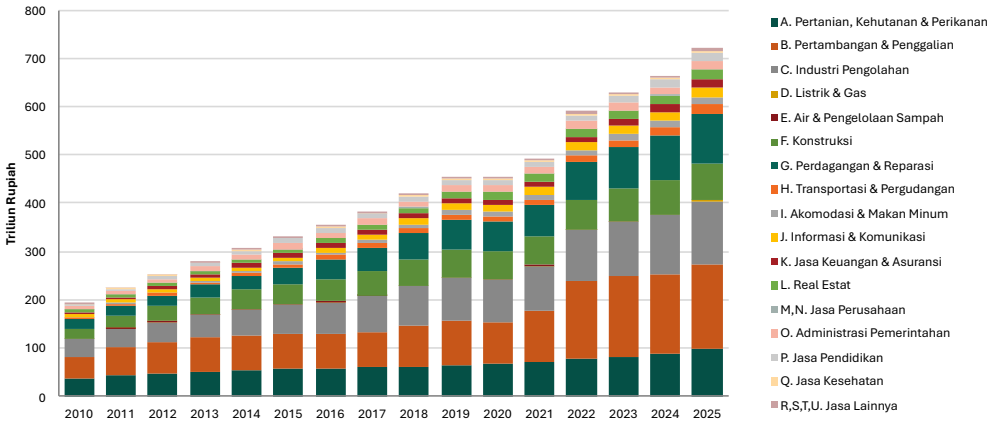
Penerapan ekonomi hijau merupakan salah satu arah kebijakan transformasi ekonomi dalam rancangan RPJPN Indonesia 20 tahun ke depan, menuju Indonesia Emas 2045. Adapun 8 fokus yang akan diimplementasikan yaitu, (1) Percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan; (2) Pengembangan *smart grid* termasuk jaringan interkoneksi dalam dan antar pulau serta sistem terisolasi (*isolated grid*); (3) Pengembangan teknologi sistem penyimpanan energi *(battery/energy storage system*); (4) Pengembangan transportasi ramah lingkungan; (5) Penerapan ekonomi sirkular; (6) Perkuatan implementasi sistem insentif dan disinsentif fiskal ataupun non fiskal untuk mendorong produk-produk hijau; (7) Pengembangan *green financing* dan penerapan *carbon pricing* untuk mendukung investasi hijau; dan (8) Penerapan prinsip ekonomi hijau di setiap sektor.

RPJPD Sumatera Selatan 2025–2045, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024, telah menempatkan pertumbuhan ekonomi hijau dalam arah pengembangan wilayah. Bagian 2.7.5 menekankan produksi pertanian dan kehutanan berkelanjutan, perlindungan dan pemulihan hutan serta gambut, penurunan emisi, dan kemitraan multipihak. Bagian 3.1.8 menekankan sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan tata ruang dan daya dukung lingkungan. Dengan dasar tersebut, pembaruan GGP berfungsi sebagai penjabaran teknis lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan RPJPD.

Sumatera Selatan memiliki posisi strategis dalam agenda pertumbuhan ekonomi hijau karena berperan sebagai sentra pangan dan perkebunan, salah satu basis energi nasional, serta memiliki kawasan gambut, hutan, dan lanskap DAS yang bernilai penting secara ekologis. Posisi ini menempatkan Sumatera Selatan pada persimpangan antara kebutuhan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan keharusan menjaga daya dukung lingkungan. Karena itu, pertumbuhan ekonomi hijau di Sumatera Selatan perlu diarahkan pada transformasi sektor pangan, energi, perkebunan, dan pemanfaatan lahan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi sumber daya, perlindungan dan restorasi ekosistem, pengurangan emisi, serta penguatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.



Gambar 1. *Kontribusi dan laju pertumbuhan PDRB Sumatera Selatan dibandingkan dengan Provinsi Lain di Indonesia pada periode 2015-2025*



Gambar 2. *PDRB Sumatera Selatan 2010-2025 berdasarkan lapangan usaha (triliun rupiah)*

Sumatera Selatan termasuk dalam klaster ekonomi sedang dalam konstelasi nasional dengan rerata laju pertumbuhan satu dekade terakhir sebesar 4,6% (masih di bawah rerata nasional) (Gambar 1). Sumatera Selatan memiliki basis ekonomi yang kuat dari pertanian, perkebunan, kehutanan, dan energi, dengan komoditas utama seperti karet, kelapa sawit, kopi, dan padi (Gambar 2). Keempat komoditas tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap perekonomian daerah, tetapi juga menjadi sumber pendapatan dan mata pencaharian masyarakat serta memiliki keterkaitan dengan rantai nilai regional dan nasional.

- Sumatera Selatan merupakan salah satu sentra karet alam utama Indonesia. Basis perkebunan rakyat yang luas menjadi modal penting untuk pengembangan karet berkelanjutan, peningkatan produktivitas, penguatan rantai nilai, dan hilirisasi.
- **Kelapa sawit** menjadi salah satu komoditas perkebunan strategis dengan kontribusi besar terhadap ekonomi dan mata pencaharian. Potensinya dapat diarahkan pada peningkatan produktivitas tanpa ekspansi ke kawasan bernilai konservasi tinggi, praktik perkebunan berkelanjutan, serta penguatan rantai pasok yang inklusif.
- **Kopi,** terutama kopi robusta, merupakan komoditas unggulan masyarakat di wilayah dataran tinggi seperti Pagar Alam, Empat Lawang, dan Muara Enim. Penguatan kualitas, branding, agroforestri, dan akses pasar memberikan peluang untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus menjaga lanskap.
- Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah penting penghasil **padi** di Indonesia. Basis produksi ini menjadi modal bagi ketahanan pangan, dengan peluang pengembangan pertanian yang lebih efisien dalam penggunaan air, adaptif terhadap perubahan iklim, dan berkelanjutan.
- Selain komoditas, **ekosistem hutan dan gambut** merupakan modal alam yang mendukung tata air, penyimpanan karbon, produktivitas pertanian, dan penghidupan masyarakat. Perlindungan dan pemulihannya menjadi bagian penting dari strategi ekonomi hijau.

Sektor berbasis lahan di Sumatera Selatan menghadapi tekanan yang saling terkait, mulai dari deforestasi dan perubahan penggunaan lahan, degradasi serta alih fungsi ekosistem gambut, kebakaran hutan dan lahan, hingga meningkatnya risiko bencana hidrometeorologis. Tekanan tersebut tidak hanya berdampak pada keanekaragaman hayati dan emisi gas rumah kaca, tetapi juga dapat mengganggu tata air, produktivitas pertanian dan perkebunan, serta ketahanan pangan dan mata pencaharian masyarakat.

Deforestasi dan degradasi hutan atau perubahan tutupan hutan dan tekanan terhadap kawasan berhutan dapat mengurangi fungsi ekologis lanskap, termasuk penyimpanan karbon, perlindungan tanah, dan pengaturan tata air. Alih fungsi dan degradasi lahan gambut mendorong perubahan tata

guna lahan dan gangguan terhadap tata air gambut meningkatkan risiko degradasi, subsidensi, dan kebakaran, sekaligus mengurangi fungsi gambut sebagai penyimpan karbon dan pengatur hidrologi.

Kebakaran hutan dan lahan terutama pada lanskap gambut menjadi ancaman terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, produktivitas lahan, dan sumber penghidupan, serta berkontribusi terhadap emisi. Bencana hidrometeorologis seperti banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, dan perubahan pola curah hujan semakin memengaruhi sektor pertanian, perkebunan, infrastruktur, serta kehidupan sehari-hari masyarakat.

Ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian, perkebunan, dan sumber daya alam membuat perubahan kondisi ekologis dan iklim dapat langsung memengaruhi pendapatan dan ketahanan pangan rumah tangga. Tekanan terhadap hutan, gambut, dan lahan serta meningkatnya risiko perubahan iklim berpotensi menurunkan produktivitas dan stabilitas produksi komoditas unggulan Sumatera Selatan, terutama padi, karet, sawit, dan kopi. Perubahan pola curah hujan, banjir, kekeringan, kebakaran, serta degradasi kualitas tanah dan tata air dapat mengganggu kalender tanam, pertumbuhan tanaman, produktivitas, dan kualitas hasil. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada tingkat produksi, tetapi juga pada pendapatan, ketahanan pangan, dan stabilitas mata pencaharian rumah tangga yang bergantung pada sektor pertanian dan sumber daya alam.

Kompleksitas lanskap Sumatera Selatan menuntut adanya arah pembangunan yang terintegrasi lintas sektor dan berbasis karakteristik wilayah. Peta jalan berbasis spasial diperlukan untuk mengidentifikasi di mana intervensi ekonomi hijau paling dibutuhkan dan paling layak dilakukan, dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan, nilai ekologis, risiko iklim dan bencana, konsentrasi komoditas, kondisi mata pencaharian, serta infrastruktur dan akses pasar. Dengan demikian, kebijakan tidak berhenti pada tingkat sektor, tetapi dapat diterjemahkan menjadi prioritas intervensi pada tingkat lanskap dan wilayah, sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, dan mitra pembangunan.

1.3 Pendekatan yang Digunakan

Penyusunan Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Sumatera Selatan dilakukan melalui kajian spasial eksplisit (*spatially explicit*) terhadap bentang alamnya. Kajian ini bertujuan merumuskan strategi penggunaan lahan yang mampu menyelaraskan kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Seluruh proses bertumpu pada tiga prinsip utama yang menjadi landasan penyusunan rencana.

Prinsip pertama adalah inklusivitas. Para pemangku kepentingan dilibatkan secara aktif sejak tahap penyusunan hingga negosiasi skenario Pertumbuhan Ekonomi Hijau, sehingga aspirasi, peluang, dan hambatan yang ada dapat dikenali sejak dini. Prinsip kedua adalah integrasi yaitu adanya sinkronisasi

antarprogram dan kegiatan, baik dari sisi ruang, waktu, penganggaran, maupun kelembagaan, agar tidak terjadi tumpang tindih.

Prinsip ketiga adalah penggunaan data, informasi, dan pemodelan yang valid. Dengan dasar tersebut, dampak dari setiap skenario pembangunan dapat diukur dan dijadikan bahan untuk menganalisis trade-off serta mendukung pengambilan keputusan. Untuk keperluan pemodelan ini, digunakan perangkat LUMENS (*Land Use Planning for Multiple Environmental Services*). Pertumbuhan Ekonomi Hijau dapat dipahami sebagai titik temu antara rencana tata ruang dan tata guna lahan dengan rencana pembangunan.

1.4 Metodologi

Perhitungan indikator makro pertumbuhan ekonomi hijau dilakukan melalui analisis dampak (*ex-ante analysis*). Daftar indikator makro yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3. Analisis pertumbuhan ekonomi hijau berbasis keruangan (spasial) dan diproses menggunakan *Land Use Planning for Multiple Environmental Services* (LUMENS).

Tabel 3. *Indikator Makro yang Digunakan dalam Ringkasan Teknis GGP Sumatera Selatan*

Indikator Makro GGP	Definisi	Satuan
PDRB	Nilai tambah bruto yang menggambarkan kondisi ekonomi wilayah	triliun Rupiah
Pendapatan per kapita	Pendapatan yang diterima oleh penduduk bekerja pada suatu wilayah	juta Rupiah/orang
Serapan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserah oleh sektor ekonomi	ribu orang
Keuntungan usaha	Total keuntungan usaha seluruh sektor	triliun
Rasio penguasaan lahan	Proporsi lahan yang dikuasai masyarkat terhadap total luas lahan produktif	%
Persentase agroforestri	Persentase area dengan tutupan penggunaan lahan agroforestri (campuran pohon dengan tanaman semusim)	%
Keterkaitan sektor lahan	Derajat keterkaitan antar sektor (angka pengganda) antara sektor berbasis lahan dengan sektor lain	indeks ekonomi regional tanpa unit
Deforestasi	Jumlah luasan hutan yang hilang per tahun	ribu ha/tahun
Tutupan pohon	Persentase luas tutupan	%
Sedimentasi	Total sedimen yang terendapkan di muara per satuan luas	ton/ha

Indikator Makro GGP	Definisi	Satuan
Laju Erosi Tanah	Besaran atau volume tanah (khususnya lapisan atas atau topsoil) yang terkelupas dan terangkut dari suatu area lahan dalam jangka waktu tertentu	ton.ha-1.tahun-1
DIFA	Tingkat keterhubungan fisik dan fungsional ekosistem penting	derajat integrasi area fokal kehati tanpa unit
Kerawanan kebakaran lahan	Persentase luas wilayah dengan tingkat kerawanan kebakaran lahan	%
Emisi sektor berbasis lahan	Emisi CO2 dari kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Forestry and Other Land Use)	Mton CO2
Emisi gambut	Emisi CO2 dari lahan gambut	Mton CO2
Serapan karbon	Serapan CO2 dari kehutanan dan penggunaan lahan lainnya	Mton CO2

Proyeksi Tutupan/Penggunaan Lahan

Proyeksi tutupan lahan dilakukan dengan pemodelan spasial. Data yang diperlukan antara lain peta penggunaan lahan multi-waktu dan peta variabel pendorong perubahan. Kemudian dilakukan kuantifikasi perubahan area melalui simulasi dinamika lanskap menggunakan Markov chain dan CA-Markov.

Dinamika Emisi Karbon

Emisi dan serapan dihitung dari perubahan tutupan lahan dan perbedaan cadangan karbon antarkelas. Emisi dekomposisi gambut dihitung terpisah agar kontribusinya dapat ditelusuri. Neraca emisi bersih dirumuskan sebagai emisi perubahan tutupan lahan ditambah emisi dekomposisi gambut, dikurangi serapan, sepanjang ketiga komponen tersebut tidak saling tumpang tindih. Setiap keluaran harus menyebutkan batas wilayah, periode akumulasi, faktor emisi, dan satuan. Kebakaran dilaporkan sebagai komponen tersendiri apabila tersedia perhitungan yang memadai; peta kerawanan tidak langsung dikonversi menjadi emisi.

Ekonomi Regional

- Analisis dampak program/kegiatan GGP terhadap PDRB menggunakan pendekatan Land-Extended Input-Output (LEIO) yang dikombinasikan dengan Mixed Endogenous-Exogenous Input-Output Model.
- Proyeksi PDRB berdasarkan penerapan program GGP disusun dengan mempertimbangkan daya dukung lahan terhadap aktivitas ekonomi sektoral. Data luas tutupan lahan dan tabel Input-Output diintegrasikan untuk menghitung Land Requirement Coefficient (LRC) dan Land Productivity Coefficient (LPC).



© Landscape Alliance

2 Peluang dan Tantangan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan Saat Ini dan Masa yang Akan Datang

2.1 Peluang

Sumatera Selatan memiliki modal yang cukup kuat untuk mempercepat transisi menuju pertumbuhan ekonomi hijau. Salah satunya terletak pada upaya memasukkan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) ke dalam indikator pembangunan daerah. Ketika target emisi tercantum dalam RPJMD, rencana tata ruang, dan rencana sektoral, penurunan emisi menjadi bagian dari tolok ukur keberhasilan pembangunan yang dipantau dan dipertanggungjawabkan secara berkala.

Peluang kebijakan yang paling konkret adalah keberadaan kerangka pertumbuhan ekonomi hijau dalam RPJPD 2025–2045. Tujuh strategi GGP telah dinyatakan secara eksplisit pada bagian 2.7.5 sehingga pembaruan dapat difokuskan pada pemilihan lokasi, penanggung jawab, pembiayaan, dan indikator pelaksanaan. Arah tersebut dapat diterjemahkan ke dalam RPJMD, RKPD, serta rencana perangkat daerah menurut kewenangannya, dengan mengacu pada tata ruang dan daya dukung lingkungan.

Di sisi ekonomi, sektor berbasis lahan menyimpan potensi besar. Pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lahan gambut menjadi tulang punggung perekonomian daerah sekaligus sumber penghidupan masyarakat. Pengelolaan yang lebih produktif dan berkelanjutan, seperti peningkatan produktivitas tanpa membuka lahan baru, restorasi gambut, dan pengembangan komoditas rendah emisi, dapat menambah nilai ekonomi tanpa mengorbankan fungsi lingkungan.

Dukungan kelembagaan juga semakin menguat melalui kemitraan multi-pihak yang telah terbangun maupun yang sedang dirintis. Kolaborasi pemerintah, sektor swasta, akademisi, lembaga masyarakat sipil, dan mitra pembangunan memungkinkan pembagian peran, pembiayaan, dan keahlian.

Letak geografis Sumatera Selatan yang strategis menambah keunggulan tersebut. Akses yang mudah ke pasar regional maupun nasional membuka peluang bagi produk berkelanjutan untuk memperoleh nilai jual lebih baik dan rantai pasok yang lebih efisien.

2.2 Tantangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu prioritas pembangunan di Sumatera Selatan, sejalan dengan komitmen Indonesia mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Musim kemarau yang memanjang dan musim hujan yang memendek, atau sebaliknya, mengganggu ketersediaan air. Akibatnya, produksi tanaman menurun dan risiko gagal tanam maupun gagal panen meningkat.

Sektor berbasis sumber daya alam, yakni pertanian, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan, sangat bergantung pada kondisi iklim. Kinerja sektor-sektor ini mengikuti cuaca dan ketersediaan sumber daya, sehingga perubahan iklim dapat langsung mengguncang perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat.

Kebakaran hutan dan lahan, khususnya di lahan gambut, menjadi ancaman terutama saat kemarau panjang. Kebakaran melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar, merusak ekosistem, membahayakan kesehatan warga, dan mengganggu aktivitas ekonomi. Karena itu, pencegahan dan pengelolaan gambut menuntut perhatian serius.

Perubahan iklim juga membawa pola curah hujan yang tidak menentu, kekeringan, banjir, dan kenaikan muka air laut di kawasan pesisir. Kejadian ekstrem tersebut merusak lahan produktif, infrastruktur, dan permukiman, serta menambah beban biaya adaptasi bagi pemerintah dan masyarakat. Di saat yang sama, produktivitas komoditas unggulan terus tergerus oleh alih fungsi lahan serta serangan hama dan penyakit.

RPJPD mencatat persoalan produktivitas padi, fluktuasi harga perkebunan, serta keterbatasan akses dan pemanfaatan pangan. Oleh sebab itu, keberhasilan GGP perlu dinilai juga dari stabilitas pendapatan dan ketahanan pangan rumah tangga, bukan hanya pertumbuhan produksi atau PDRB.

3

Rumusan Pembaruan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan

3.1 Pengembangan Skenario Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Skenario disusun bertingkat untuk memisahkan pengaruh penataan alokasi lahan, peningkatan produktivitas, dan hilirisasi. BAU menjadi pembanding dengan asumsi historis yang digunakan dalam draf; GGP-1 menambahkan pengelolaan alokasi lahan, GGP-2 menambahkan produktivitas dan akses pasar, dan GGP-3 menambahkan penguatan rantai nilai. Istilah GGP dalam perbandingan ekonomi merujuk pada GGP-3; pada keluaran biofisik, GGP merujuk pada skenario tutupan lahan intervensi. Perbedaan cakupan ini harus diperhatikan ketika menafsirkan manfaat lintas indikator.

Tabel 4. *Definisi dan asumsi yang digunakan dalam skenario BAU dan GGP*

Skenario	Definisi	Asumsi
BAU Bisnis-Seperti-Biasa/ Business as Usual	Skenario ini merupakan proyeksi kondisi ekonomi dan lingkungan yang berjalan tanpa adanya intervensi kebijakan baru atau perubahan signifikan dalam tata kelola sumber daya hingga tahun 2045	Proyeksi perubahan penggunaan lahan dimodelkan dengan mengacu pada data historis tahun 2020 sampai tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi sektor non-LaS diproyeksikan dengan rerata pertumbuhan ekonomi 10 tahun terakhir
GGP-1 Alokasi lahan yang baik melalui tata ruang dan tata guna lahan	Skenario ini menerapkan prinsip pengelolaan tata ruang dan tata guna lahan yang tertuang pada Strategi-1 melalui Alokasi dan tataguna lahan berkelanjutan yang merupakan penyelarasan antara kebutuhan lahan dengan ketersediaan lahan.	Proyeksi perubahan penggunaan lahan dan pemanfaaat ruang memsukkan unsur kesesuaian lahan dan tata ruang, pertumbuhan ekonomi sektor lahan diproyeksikan dengan menggunakan pemodelan ekonomi tabel Input-Output

Skenario	Definisi	Asumsi
GGP-2 GGP-1 + peningkatan produktivitas komoditas strategis	Pengembangan dari GGP-1 dengan memasukkan peningkatan produktivitas dan perbaikan akses pasar pada komoditas strategi karet, kopi, kelapa sawit, padi, dan perikanan pada Strategi-2	Seluruh asumsi pada GGP-1, dipadukan dengan penerapan Good Agricultural Practices (GAP) pada komoditas karet, kopi, kelapa sawit, padi, dan perikanan selain itu diterapkan juga perbaikan harga dan akses pasar melalui diversifikasi komoditas akhir serta kelembagaan petani yang lebih kuat. Pada akhir simulasi, diperkirakan hampir separuh area pertanian telah berhasil menerapkan GAP dan perbaikan akses pasar.
GGP-3 GGP-2 + perbaikan rantai nilai komoditas melalui hilirisasi	Pengembangan dari GGP-2 dengan menambahkan perbaikan rantai nilai komoditas strategis pada Strategi-2 melalui hilirisasi produk dan peningkatan investasi.	Seluruh asumsi pada GGP-2, dipadukan dengan skenario hilirisasi komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan secara bertahap sampai tahun 2045

3.2 Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau

1. Alokasi dan tataguna lahan berkelanjutan yang merupakan penyelarasan antara kebutuhan lahan dengan ketersediaan lahan

Berbagai kepentingan lokal, regional maupun global bermuara pada kebutuhan akan lahan (*land requirement*). Namun, karena berbagai keterbatasan seringkali tidak semua kebutuhan akan lahan bisa dipenuhi oleh ketersediaan lahan lokal (*land availability*) yang memadai pada semua area. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya proses penyelarasan dan prioritasisasi antara kedua faktor tersebut sehingga bisa tercapai tata guna lahan yang adil, efektif dan berkelanjutan. Strategi ini pada dasarnya merinci dan mempertajam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumatera Selatan sehingga mampu memberikan indikasi lokasi untuk keenam strategi lainnya. Strategi ini berusaha menyeimbangkan berbagai pemenuhan kebutuhan akan lahan dengan tetap mempertahankan maupun memperbaiki kualitas lingkungan. Ekspansi dialokasikan pada area yang sesuai dan berdampak lingkungan kecil. Area yang wajib dilindungi perlu diperhatikan untuk menghindari kerusakan lingkungan dan peningkatan emisi GRK.

2. Peningkatan akses masyarakat terhadap modal penghidupan (*livelihood capital*)

Modal penghidupan secara garis besar mencakup lima hal, yaitu modal alam, fisik, finansial, sosial dan sumber daya manusia. Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah modal yang merupakan unsur lokal, sedangkan penanaman modal sebagai

modal finansial dan jaringan kerja antar wilayah sebagai modal sosial merupakan unsur eksternal. Tanpa adanya akses yang baik terhadap lima modal tersebut, beberapa kelompok masyarakat tidak mampu berpartisipasi dalam Pertumbuhan Ekonomi Hijau meskipun tataguna lahan sudah adil dan efektif, sehingga peningkatan pendapatan dan penghidupan tidak akan tercapai. Dengan adanya akses terhadap modal alam, fisik, finansial, sosial dan pengembangan SDM melalui perbaikan prasarana dan sarana, maka petani dapat merasakan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan memiliki ketahanan (*resilience*) terhadap fluktuasi harga dan musim.

3. Peningkatan produktivitas dan diversifikasi

Teknologi dan praktik pengelolaan lahan yang sesuai dan berkelanjutan akan meningkatkan produktivitas per unit luasan lahan yang digarap sehingga bisa meningkatkan pendapatan. Diversifikasi akan memberikan manfaat beragam yang bisa menurunkan kerentanan petani akan ketidakpastian cuaca dan harga. Melalui perbaikan teknologi dan praktek pengelolaan lahan, maka laju ekonomi yang tinggi bisa dicapai tanpa penggunaan lahan yang ekspansif yang mendorong alihguna lahan yang lebih lanjut, sehingga dampak negatif lingkungan dapat dihindari.

4. Perbaikan rantai nilai dengan pembagian manfaat yang adil

Melalui perbaikan rantai nilai dari hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan, Sumatera Selatan mempunyai keterkaitan erat dengan konsumer global (*tele-connectivity*). Dengan mendorong adanya rantai pasar maupun rantai nilai yang lebih efektif dan adil dalam pembagian manfaat antara petani, perantara, dan industri hilir, serta penambahan nilai di area penghasil bahan baku, maka manfaat pengganda bisa dinikmati di tingkat lokal. Pembagian manfaat yang lebih baik dan adil sepanjang rantai nilai akan mendorong tercapainya pemerataan pertumbuhan dan juga ketahanan sosial yang lebih tinggi.

5. Peningkatan konektivitas dan skala ekonomi

Konektivitas menghubungkan antar wilayah di dalam Provinsi Sumatera Selatan maupun antar wilayah di Sumatera atau ke luar Sumatera, bahkan antar negara dalam arus perdagangan, arus aliran tenaga kerja, produk mentah dan olahan. Peningkatan konektivitas tersebut akan menciptakan skala ekonomi sehingga mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta ketahanan ekonomi dengan meningkatkan PDRB serta pemerataan. Dengan adanya industri hilir, ketahanan terhadap fluktuasi harga bahan mentah juga akan meningkat.

6. Restorasi lahan dan hutan terdegradasi

Strategi ini mengupayakan pulihnya fungsi hutan dan lahan sesuai dengan alokasinya pada suatu area. Strategi ini tidak terbatas pada restorasi ekologis hutan untuk mengembalikan suatu area menjadi hutan alam kembali, tetapi juga mencakup revitalisasi penghidupan. Restorasi berpotensi menyumbang peningkatan ketersediaan lahan untuk memenuhi berbagai kesenjangan dalam kebutuhan lahan. Selain itu, restorasi untuk mengembalikan fungsi akan meningkatkan ketahanan lingkungan.

7. Insentif jasa lingkungan dan pendanaan inovatif komoditas berkelanjutan

Mekanisme insentif dan disinsentif, serta pendanaan inovatif jasa lingkungan sangat potensial dalam mendukung capaian Pertumbuhan Ekonomi Hijau dalam menjamin keberlanjutan investasi finansial dan non-finansial untuk menurunkan emisi GRK, meningkatkan ketahanan dan menjaga kualitas lingkungan, serta menyediakan jasa lingkungan. Mekanisme ini sudah dicanangkan dalam UU 32/2009, akan tetapi sampai saat ini implementasinya masih sangat terbatas pada skala lokal atau percontohan. Strategi ini merupakan strategi inovatif untuk Provinsi Sumatera Selatan karena mekanisme insentif dan pendanaan jasa lingkungan dengan skala provinsi dan dikaitkan dengan intervensi integratif Pertumbuhan Hijau.



4

Perkiraan Dampak Terhadap Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Perkiraan Dampak Terhadap Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau menyajikan analisis dampak teknis (ex-ante analysis) yang membandingkan proyeksi pembangunan antara skenario Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth Plan/GGP) dengan skenario Bisnis Seperti Biasa (Business as Usual/ BAU). Evaluasi dampak ini disimulasikan menggunakan perangkat pemodelan spasial LUMENS dan analisis kerangka ekonomi regional Input-Output untuk mengukur dinamika pada 17 indikator makro yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui integrasi tujuh pilar strategi, yaitu mulai dari penataan alokasi lahan, peningkatan produktivitas komoditas unggulan, hingga perbaikan rantai nilai dan hilirisasi—bab ini memberikan pembuktian berbasis data bahwa penerapan skenario GGP tidak menghambat pembangunan, melainkan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang mendorong kenaikan PDRB, perluasan penyerapan tenaga kerja, serta penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) secara signifikan.

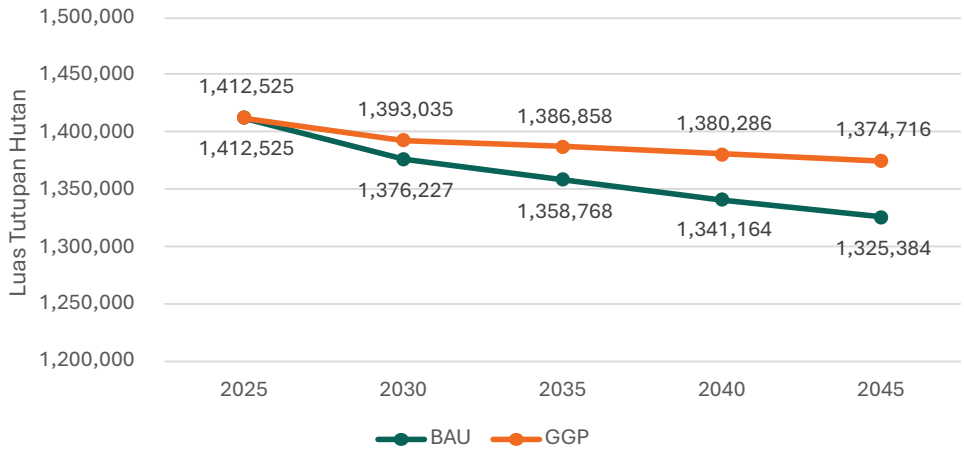
Guna memberikan pemahaman yang menyeluruh, analisis dampak dalam bab ini dikelompokkan berdasarkan pencapaian lima visi utama pembangunan hijau daerah:

1. **Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,** yang ditunjukkan oleh proyeksi peningkatan PDRB sektor berbasis lahan serta PDRB per kapita relatif terhadap skenario BAU.
2. **Pertumbuhan yang inklusif dan merata,** yang diukur melalui peningkatan rasio pendapatan masyarakat terhadap keuntungan usaha serta pemerataan rasio penguasaan lahan.
3. **Ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan,** yang dipacu oleh perluasan sistem usaha tani agroforestri, penguatan keterkaitan antarsektor, dan perbaikan keuntungan usaha tani.
4. **Ekosistem yang sehat dan produktif,** yang dinilai dari laju penutupan hutan, persentase tutupan pohon, penurunan laju sedimentasi/erosi, serta penurunan kerawanan kebakaran lahan dan gambut.
5. **Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK),** yang ditargetkan melalui pengurangan emisi kotor sektor lahan mineral dan lahan gambut serta peningkatan kapasitas sekuestrasi karbon.

4.1 Perubahan tutupan lahan historis dan proyeksi

Penutupan hutan

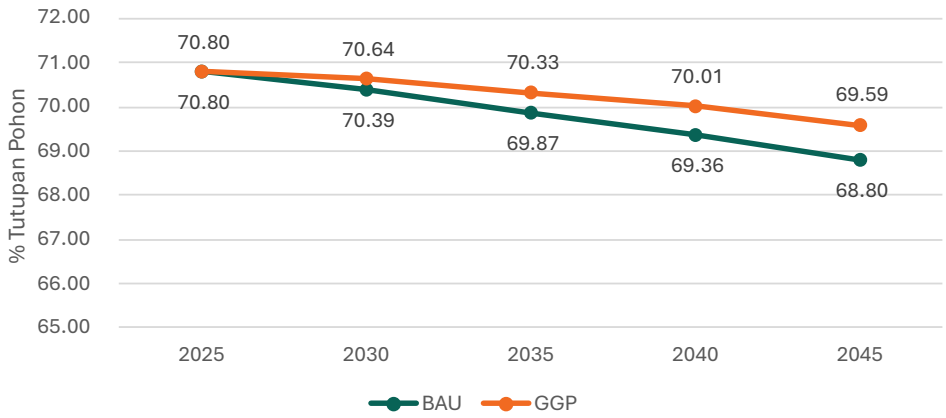
Luas penutupan hutan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 mencapai 1,41 juta hektare. Secara tren historis, luas ini terus mengalami penurunan. Jika dilakukan proyeksi dengan skenario pertumbuhan ekonomi hijau yang memfokuskan berbagai intervensi untuk mempertahankan hutan, penurunan yang terjadi dapat diperlambat. Pada tahun 2045 diproyeksikan penutupan hutan dapat dipertahankan seluas 1,37 juta hektare dengan skenario pertumbuhan ekonomi hijau, lebih luas dibandingkan skenario BAU.



Gambar 3. *Proyeksi luas penutupan hutan dengan skenario BAU dan GGP (2025-2045)*

Tutupan pohon

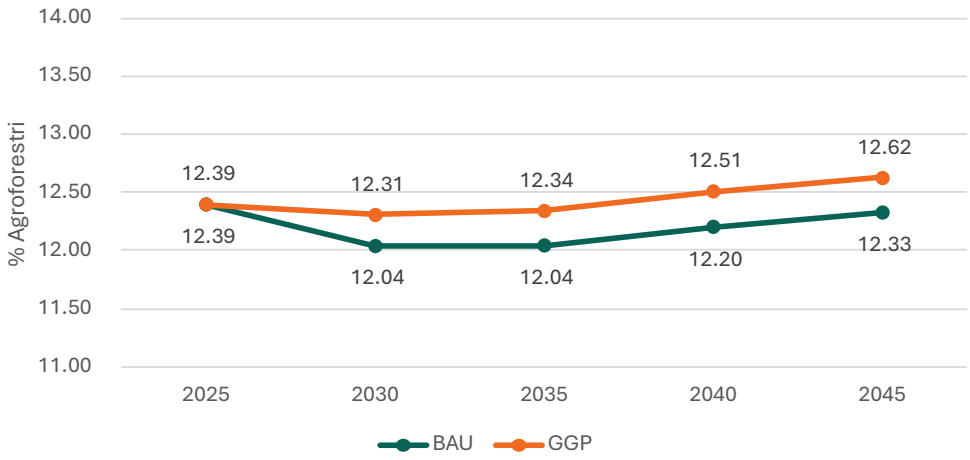
Tutupan pohon mengalami tren penurunan seiring dengan berkurangnya penutupan hutan. Dari persentase tutupan 70,80% pada tahun 2025 menjadi 68,80% pada tahun 2045 dengan skenario BAU. Sedangkan skenario pertumbuhan ekonomi hijau dapat mempertahankan persentase sampai 69,59% pada tahun 2045.



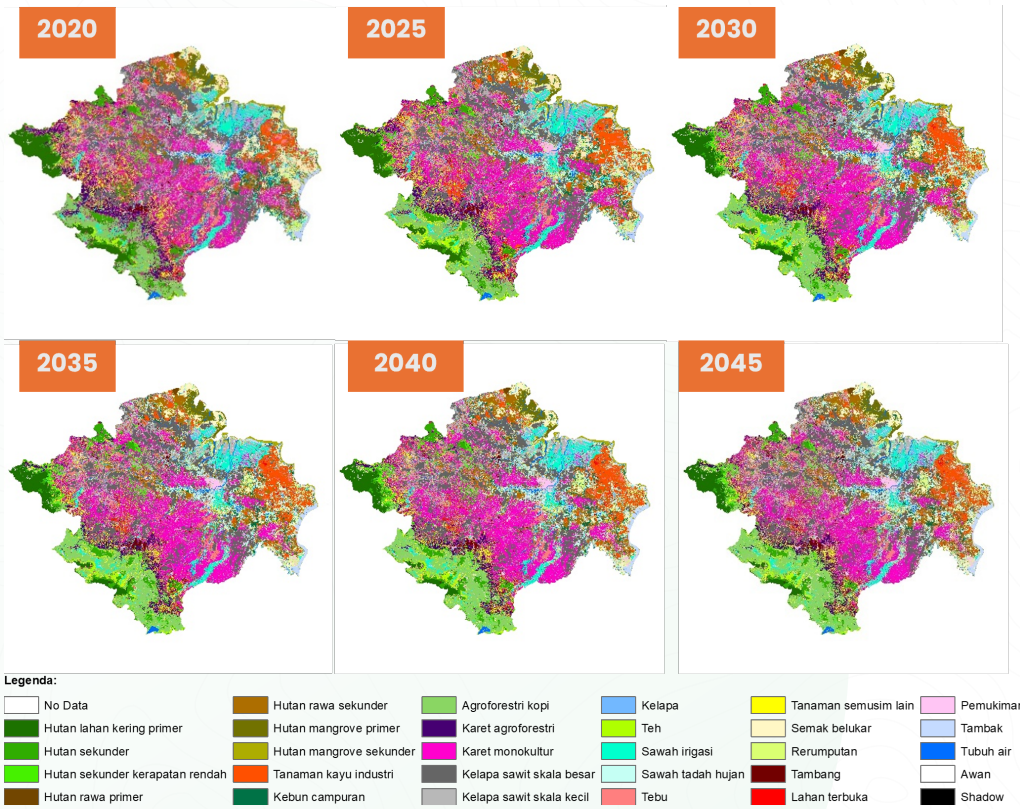
Gambar 4. *Proyeksi persentase tutupan pohon dengan skenario BAU dan GGP (2025-2045)*

- Persentase agroforestri

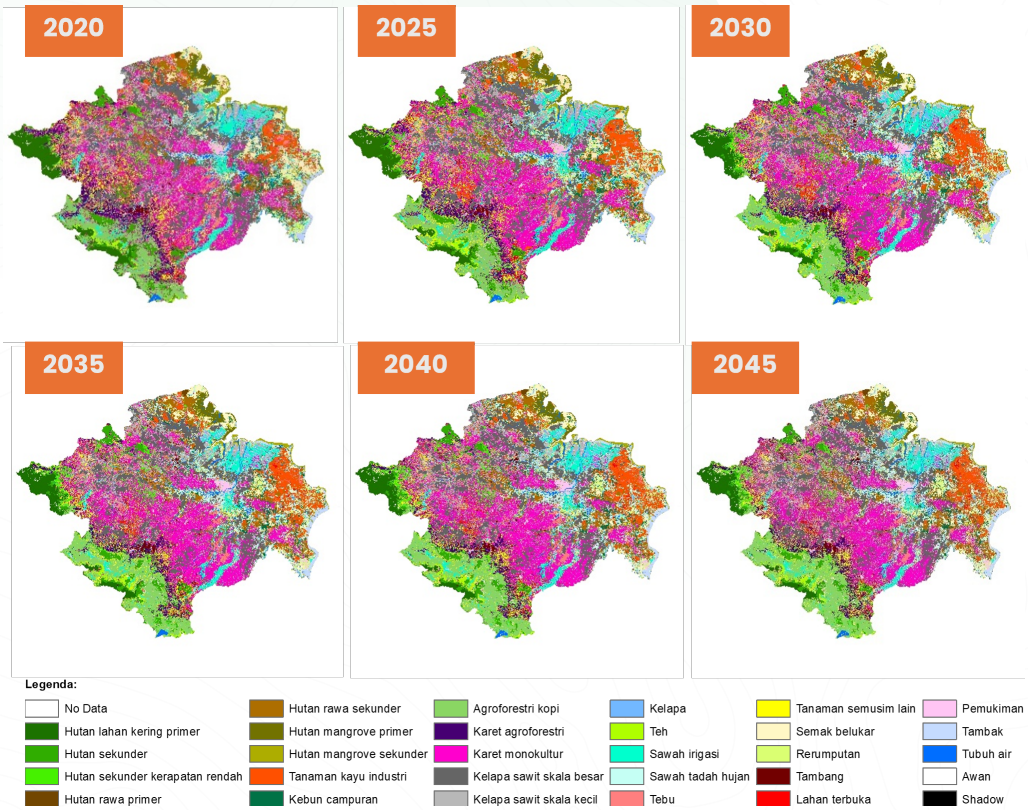
Luas agroforestri dengan skenario BAU menunjukkan penurunan pada awal periode simulasi sampai tahun 2030. Kemudian mengalami peningkatan sampai sekitar 12,33% pada tahun 2045. Tren ini ditingkatkan dengan skenario GGP hingga dapat mencapai persentase agroforestri sebanyak 12,62% pada tahun 2045.



Gambar 5. *Proyeksi persentase agroforestri dengan skenario BAU dan GGP (2025-2045)*



(a)



(b)

Gambar 6. *Proyeksi Penggunaan Lahan Provinsi Sumatera Selatan; (a) Skenario BAU, (b) Skenario GGP (2020-2045)*

Proyeksi penggunaan lahan Provinsi Sumatera Selatan periode 2020-2045 memperlihatkan bahwa tutupan hutan terkonsentrasi pada dua bentang alam berbeda. Hutan lahan kering primer dan hutan sekunder terutama menempati kawasan dataran tinggi di bagian barat hingga barat daya, sedangkan hutan rawa primer dan sekunder serta hutan mangrove tersebar di dataran rendah dan pesisir timur. Berdasarkan data luasan, hutan lahan kering primer dan hutan sekunder cenderung menyusut pada kedua skenario, sementara hutan sekunder kerapatan rendah justru bertambah, yang mengindikasikan degradasi hutan bertahap. Hutan rawa sekunder relatif stabil sepanjang periode proyeksi, sedangkan hutan mangrove sekunder mengalami penyusutan. Skenario GGP mempertahankan luasan hutan primer dan sekunder lebih baik dibandingkan BAU, dengan penurunan yang lebih landai pada hutan lahan kering dan mangrove.

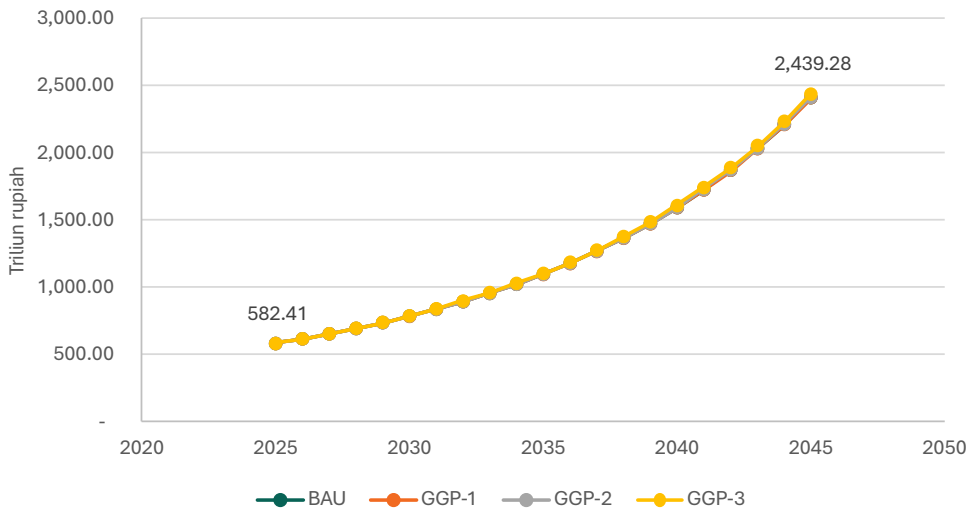
Pada kelompok tutupan pohon dan agroforestri, karet monokultur merupakan kelas dominan yang menempati bagian tengah provinsi, diikuti kelapa sawit skala besar dan kecil yang tersebar luas di wilayah tengah hingga timur, serta tanaman kayu industri yang menonjol di bagian timur dan tenggara. Luasan karet monokultur dan sawit skala kecil

menurun secara bertahap, sedangkan sawit skala besar dan tanaman kayu industri meningkat, dengan tanaman kayu industri mulai melandai pada periode akhir. Agroforestri kopi, yang berpusat di dataran tinggi bagian barat dan selatan, terus meluas pada kedua skenario dan lebih besar pada GGP. Sebaliknya, karet agroforestri dan kebun campuran menurun, sehingga sistem tanam campuran bertransformasi menuju agroforestri kopi, tanaman kayu industri, dan perkebunan monokultur. Kelas pertanian pangan seperti sawah irigasi dan sawah tadah hujan tersebar di dataran rendah bagian timur dan tengah, dengan sawah tadah hujan meningkat dan sawah irigasi menurun. Adapun pemukiman, tambak, dan tambang terus berekspansi pada kedua skenario dengan laju yang relatif serupa.

4.2 Pertumbuhan ekonomi (proyeksi PDRB skenario BAU vs GGP)

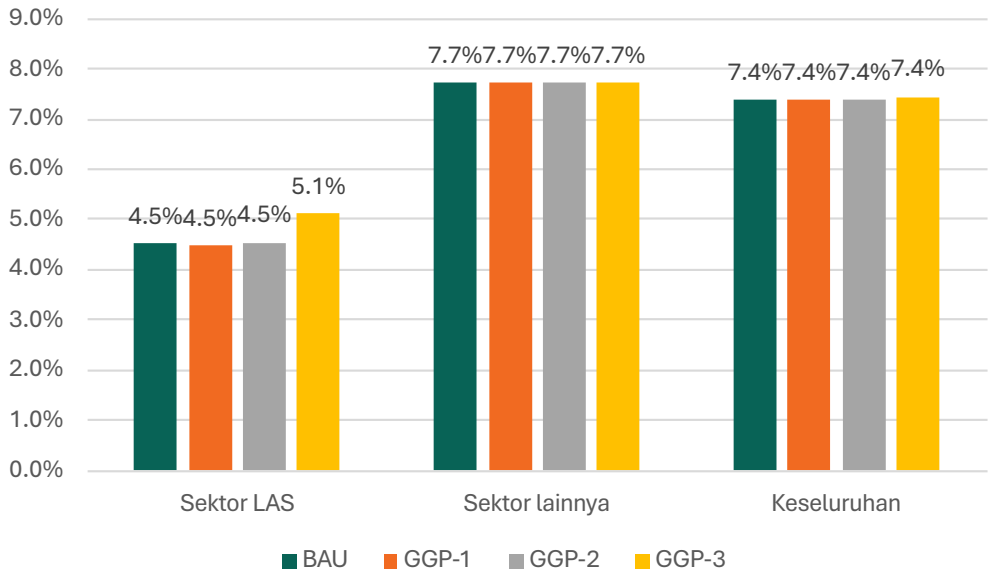
- PDRB (triliun rupiah)

Pendapatan domestik regional bruto merupakan salah satu indikator kinerja perekonomian suatu wilayah. Proyeksi terhadap PDRB digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai arah pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah yang didasarkan pada dua skenario utama yakni BaU serta skenario intervensi GGP. Skenario BaU didasarkan pada asumsi bahwa kondisi ekonomi dan lingkungan yang berjalan tanpa adanya intervensi kebijakan baru atau perubahan signifikan dalam tata kelola sumber daya hingga tahun 2045. Skenario GGP-3 didasarkan pada asumsi bahwa terjadi perubahan penggunaan ruang darat laut melalui kebijakan pengelolaan yang terintegrasi serta usaha peningkatan produktivitas komoditas strategis dibarengi dengan hilirisasi dan peningkatan investasi. Komoditas strategis yang dilakukan intervensi pada GGP diantaranya adalah tanaman pangan, kopi, karet, kelapa sawit, dan perikanan yang tertuang pada GGP-2.



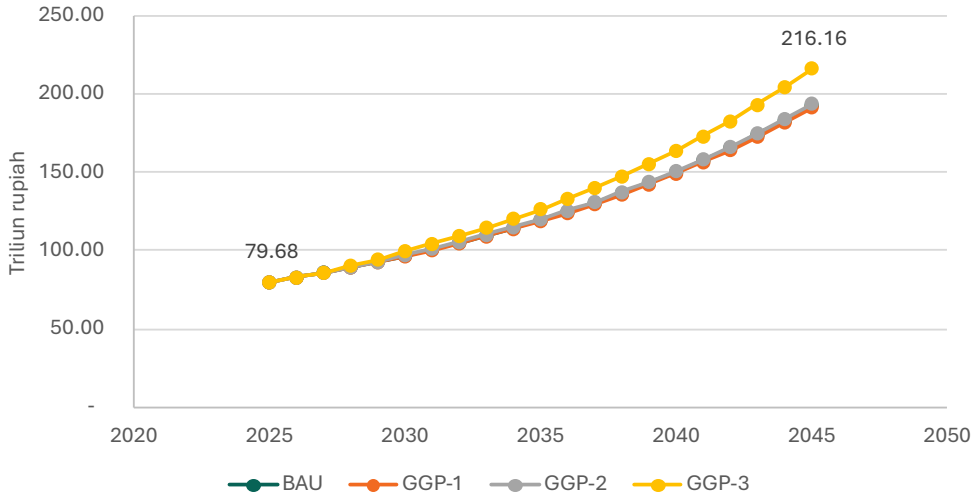
Gambar 7. *Proyeksi PDRB seluruh sektor dengan skenario BAU dan GGP (2025-2045)*

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada akhir periode simulasi tahun 2045, penerapan skenario GGP mampu menghasilkan PDRB sebanyak 2,439.28 triliun rupiah. Angka tersebut 1.09% lebih besar ketimbang hasil proyeksi PDRB menggunakan skenario BaU yakni 2,413.01 triliun rupiah. Penerapan intervensi skenario GGP menunjukkan bahwa rerata laju pertumbuhan ekonomi keseluruhan sektor diproyeksikan sebesar 7.4% Pertumbuhan sektor SDA dengan perubahan rerata laju pertumbuhan dari 4.5% (Skenario BaU) menjadi 5.1% (Skenario GGP).



Gambar 8. *Proyeksi rerata pertumbuhan ekonomi dengan skenario BAU dan GGP*

Jika berfokus khusus pada sektor lahan, proyeksi menunjukkan bahwa penerapan skenario GGP mampu memberikan peningkatan PDRB yang signifikan, yakni tumbuh hingga 216,16 triliun rupiah pada tahun 2045. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 12.25% apabila dibandingkan dengan PDRB sektor lahan pada skenario BaU yang hanya mencapai 192,57 triliun rupiah.

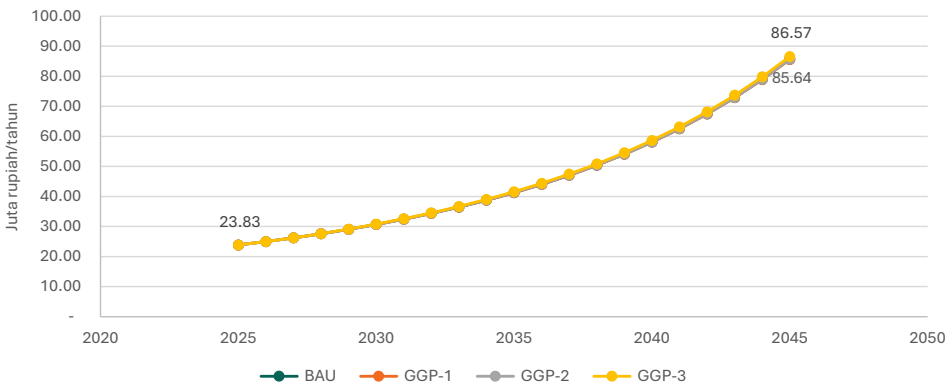


Gambar 9. *Proyeksi PDRB sektor lahan dengan skenario BAU dan GGP*

- Pendapatan per kapita

Pendapatan per kapita merupakan indikator yang menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di Sumatera Selatan. Dalam proyeksi ini, pendapatan per kapita dihitung berdasarkan total pendapatan kompensasi tenaga kerja dari seluruh sektor di Sumatera Selatan. Nilai tersebut kemudian dibagi dengan total penduduk Sumatera Selatan pada setiap tahun proyeksi. Pendapatan per kapita meningkat pada seluruh skenario sepanjang 2025–2045, dengan intervensi GGP-3 menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan skenario BAU.

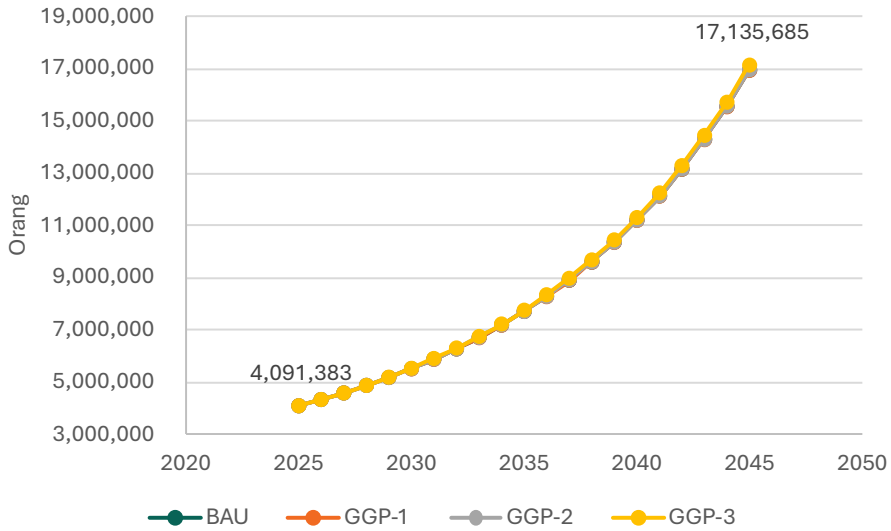
Pendapatan per kapita dengan penerapan intervensi GGP-3 mencapai Rp86.57 juta/kapita/tahun, atau 19% lebih tinggi dibandingkan penerapan skenario BAU sebesar Rp85.64 juta/kapita/tahun. Perbedaan ini tercermin dari rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 6.60% menggunakan intervensi GGP-3.



Gambar 10. *Proyeksi pendapatan per kapita dengan skenario BAU dan GGP (2025-2045)*

- Serapan tenaga kerja

Proyeksi serapan tenaga kerja mengasumsikan penambahan tenaga kerja baru tahunan sebagai hasil akumulasi selisih pertumbuhan PDRB yang diselaraskan dengan nilai Labor Multiplier. Intervensi melalui skenario GGP diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa Intervensi skenario GGP-3 di akhir tahun 2045 diproyeksikan mampu meningkatkan total tenaga kerja sebesar 17.135.685 orang. Menerapkan skenario GGP -3 berpotensi menciptakan lapangan kerja baru sebesar 184.541 jiwa lebih banyak dibandingkan skenario BAU pada tahun 2045. Angka tersebut 1.09% lebih besar bila dibandingkan dengan hasil simulasi penerapan skenario BaU yakni 16.951.144 orang.

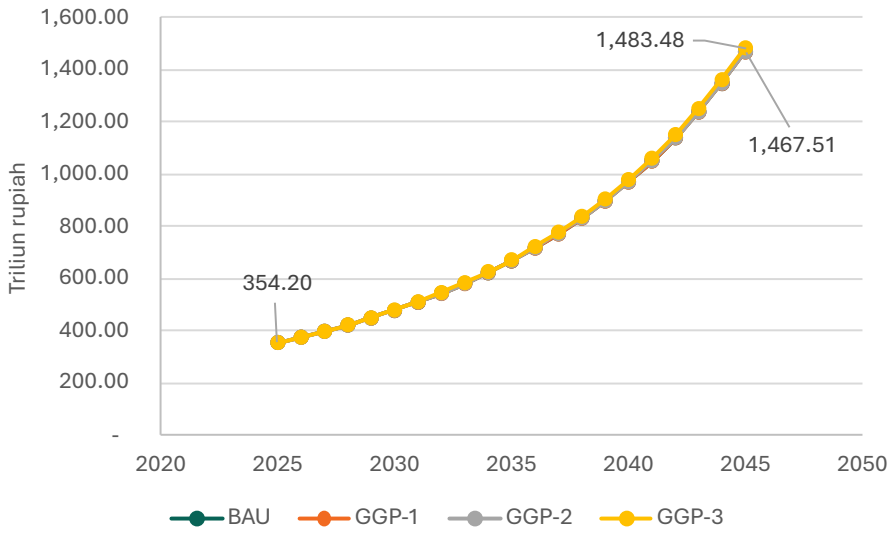


Gambar 11. *Proyeksi serapan tenaga kerja dengan skenario BAU dan GGP (2025-2045)*

- Pertumbuhan keuntungan usaha

Proyeksi total keuntungan usaha regional dihitung berdasarkan proporsi Surplus Usaha Bruto (*Gross Operating Surplus*) terhadap total PDRB, yang kemudian diselaraskan dengan proyeksi PDRB. Indikator ini mencerminkan porsi nilai tambah ekonomi yang diperoleh para pelaku usaha dan pemilik modal atas investasi serta aktivitas bisnis di wilayah Sumatera Selatan.

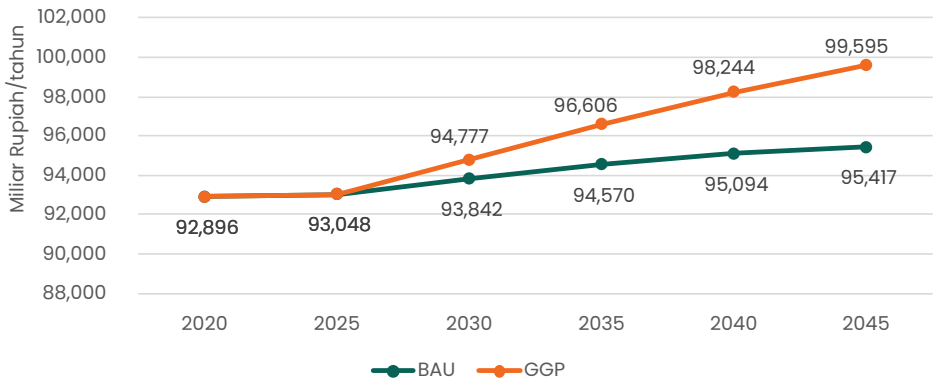
Tanpa adanya intervensi kebijakan perekonomian regional, keuntungan usaha diproyeksikan tumbuh secara alamiah hingga mencapai Rp1,467.51 triliun pada tahun 2045. Sedangkan dengan adanya penerapan skenario GGP menghasilkan capaian tertinggi nilai proyeksi keuntungan usaha mencapai Rp1,483.48 triliun pada akhir periode simulasi tahun 2045. Menerapkan skenario GGP-3 berpotensi memberikan tambahan keuntungan usaha sebesar Rp16 triliun lebih tinggi dibandingkan skenario BAU pada tahun 2045.



Gambar 12. *Proyeksi keuntungan usaha dengan skenario BAU dan GGP (2025-2045)*

Pendapatan keuntungan usaha menggambarkan manfaat ekonomi yang diterima oleh pelaku usaha sebagai hasil dari perkembangan aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Grafik di bawah menunjukkan bahwa di akhir periode tahun 2045, potensi keuntungan usaha regional dapat ditingkatkan menjadi 1.09% lebih besar dengan menerapkan skenario GGP-3 dibanding skenario BaU. Melalui penerapan intervensi GGP-3, keuntungan usaha regional di Sumatera Selatan secara rata-rata diproyeksikan 0.6% lebih tinggi dibandingkan jika wilayah berjalan dengan skenario BAU.

Keuntungan Usaha Tani



Gambar 13. *Proyeksi Keuntungan Usaha Tani dengan skenario BAU dan GGP (2025-2045)*

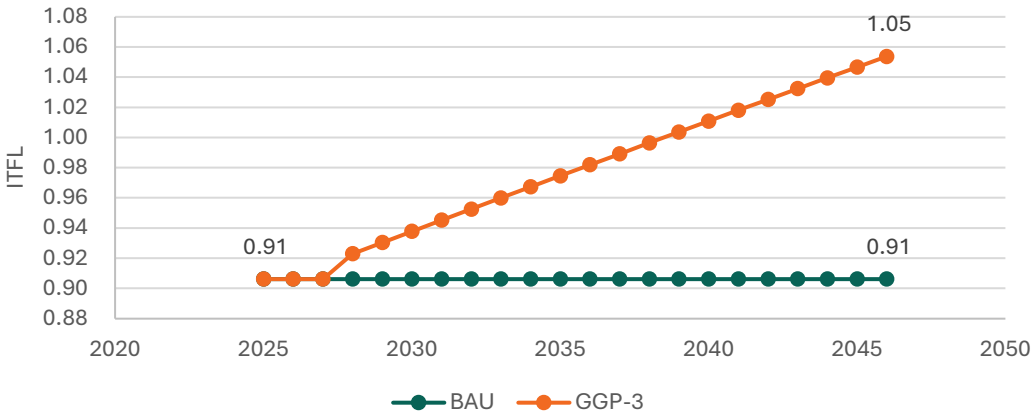
Total keuntungan usaha tani menggambarkan manfaat ekonomi yang diterima pelaku usaha tani sebagai hasil dari aktivitas perkebunan, pertanian dan perikanan di Provinsi Sumatera Selatan. Skenario *Business as Usual* (BAU) menggambarkan pengelolaan usaha tani tanpa intervensi, sedangkan skenario GGP merupakan gabungan *Good Agricultural Practices* (GAP), yaitu perbaikan praktik usaha tani untuk meningkatkan produktivitas, dan *Market Intervention* (MI) pada sisi pasar dan perubahan bentuk hasil panen menjadi produk turunannya. Grafik di atas menunjukkan keuntungan pada skenario BAU tumbuh lambat hingga mencapai Rp95,4 triliun pada 2045 (naik sekitar 2,7% dibandingkan 2020), sedangkan skenario GGP tumbuh lebih cepat hingga mencapai Rp99,6 triliun pada 2045 (naik sekitar 7,2%). Dengan demikian, pada akhir periode proyeksi skenario GGP menghasilkan keuntungan usaha tani sekitar Rp4,2 triliun atau 4,4% lebih tinggi dibandingkan skenario BAU. Penerapan skenario GGP baru mencakup sebagian kecil luas lahan pada komoditas tertentu, seperti kopi, karet, kelapa sawit skala kecil, padi sawah, dan tambak, sehingga dampaknya terhadap total keuntungan seluruh usaha tani masih terbatas. Meski demikian, selisih antarskenario yang terus membesar sejak 2030 menunjukkan bahwa perluasan adopsi GGP berpotensi memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar pada masa mendatang.

- Keterkaitan sektor SDA dengan sektor lain

Indeks Total Forward Linkage (ITFL) atau Indeks Derajat Kepekaan mengukur sejauh mana sektor berbasis lahan berfungsi sebagai penyedia input (supplier) bagi pertumbuhan sektor-sektor perekonomian lainnya. Semakin tinggi nilai ITFL, semakin kuat dorongan yang diberikan oleh sektor lahan terhadap rantai pasok hilir (forward linkage) dan sektor olahan di dalam struktur ekonomi regional.

Pada kondisi BAU, rerata nilai ITFL sektor lahan berada pada tingkat yang sangat datar dan stagnan di kisaran 0,91 sepanjang periode 2025 hingga 2045. Hal ini mengindikasikan bahwa tanpa adanya intervensi struktur perekonomian, keterkaitan sektor lahan terhadap sektor hilir tidak mengalami penguatan dan cenderung bertindak sekadar sebagai penyedia bahan baku mentah tanpa integrasi rantai nilai yang memadai. Penerapan skenario GGP-3 memperlihatkan peningkatan rerata ITFL yang signifikan dan konsisten membentuk pola naik. Dimulai dari titik awal yang sama pada tahun 2025–2027 (0,89), nilai ITFL meningkat secara bertahap menembus 0,92 pada kisaran tahun 2028, melampaui 1 pada periode 2040 hingga mencapai puncaknya mendekati 1,05 pada tahun 2045.

Kenaikan bertahap pada kurva simulasi GGP membuktikan bahwa intervensi kebijakan (penguatan akses lahan, peningkatan produktivitas, serta optimalisasi rantai nilai dan hilirisasi) berhasil mengubah peran sektor lahan dari sekadar sektor primer mentah menjadi mesin penggerak industri olahan lokal. Peningkatan nilai ITFL ini mengonfirmasi bahwa setiap pertumbuhan output pada sektor lahan di bawah skenario GGP-3 akan terdistribusi secara lebih luas sebagai input bagi sektor industri karet, industri makanan dan minuman, industri kertas, dan industri kayu.

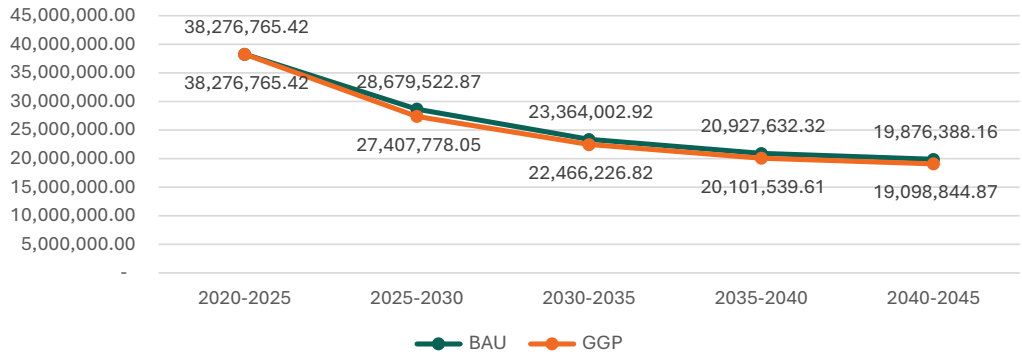


Gambar 14. *Proyeksi keterkaitan kedepan sektor SDA dengan skenario BAU dan GGP (2025-2045)*

4.3 Emisi dan sekuestrasi GRK (proyeksi skenario BAU vs GGP)

- Emisi sektor berbasis lahan

Proyeksi emisi karbon diperoleh dari perubahan penggunaan dan tutupan lahan pada lahan mineral di Provinsi Sumatera Selatan periode 2020-2045. Kedua skenario menunjukkan tren penurunan emisi yang konsisten, dimulai dari titik yang sama pada periode 2020-2025 sebesar 38 juta ton CO_2e. Pada periode 2025-2030, emisi BAU turun menjadi 28 juta ton CO_2e dan GGP menjadi 27 juta ton CO_2e. Pada periode akhir simulasi (2040-2045), emisi karbon menjadi 19.87 ton CO_2e pada BAU dan 19.09 juta ton CO_2e pada GGP. Penurunan signifikan di awal dan melandai pada periode akhir mencerminkan melambatnya laju konversi tutupan lahan pada lahan mineral.

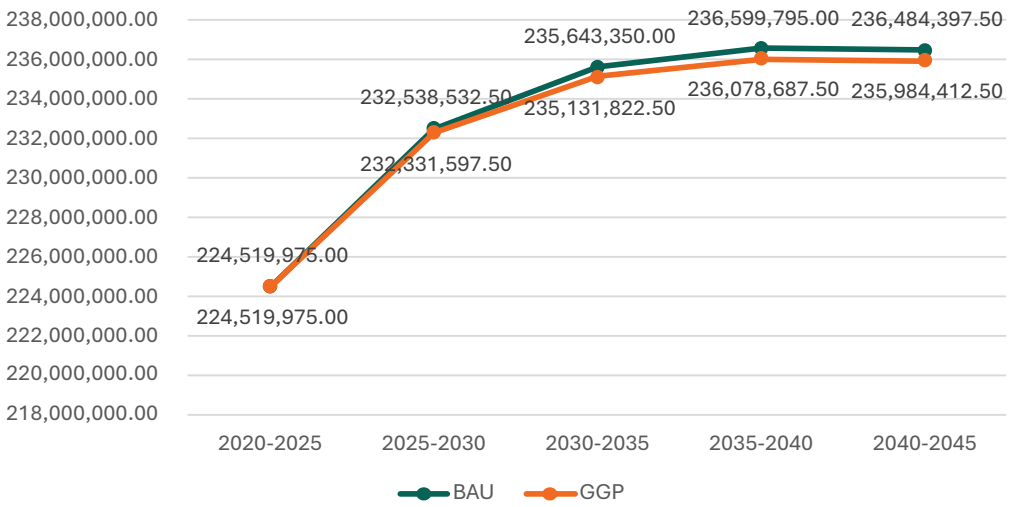


Gambar 15. *Proyeksi Emisi (Nett ton CO2 eq) dari Perubahan Penggunaan Lahan (2020-2045)*

Skenario GGP secara konsisten berada di bawah skenario BAU pada setiap periode, dengan selisih penurunan emisi sekitar 4% dari emisi skenario BAU. Secara kumulatif selama 2025-2045, penerapan skema pertumbuhan ekonomi hijau mampu menurunkan emisi sebesar 3.77 juta ton CO_2e (sekitar 4,06%) dibandingkan skenario BAU. Dari kondisi awal hingga akhir periode proyeksi, emisi turun sekitar 48,07% pada skenario BAU dan 50,10% pada skenario GGP. Selisih ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi hijau memberikan kontribusi penurunan emisi pada lahan mineral.

- Emisi gambut

Proyeksi emisi dekomposisi gambut di Provinsi Sumatera Selatan periode 2020-2045, yang membandingkan skenario Business as Usual (BAU) dengan skenario pertumbuhan ekonomi hijau (Green Growth Plan/GGP). Berbeda dengan emisi pada lahan mineral yang menurun, emisi dekomposisi gambut justru meningkat pada kedua skenario, dari 224.51 juta ton CO_2e pada periode 2020-2025 menjadi 232.53 juta ton CO_2e (BAU) dan 232.33 juta ton CO_2e (GGP) pada periode 2025-2030. Peningkatan terus berlanjut dengan laju yang semakin melandai hingga mencapai puncak pada periode 2035-2040, yaitu 236.59 juta ton CO_2e pada skenario BAU dan 236.08 juta ton CO_2e pada skenario GGP, sebelum sedikit menurun pada periode 2040-2045 menjadi 236.48 juta ton CO_2e (BAU) dan 235.98 juta ton CO_2e (GGP).

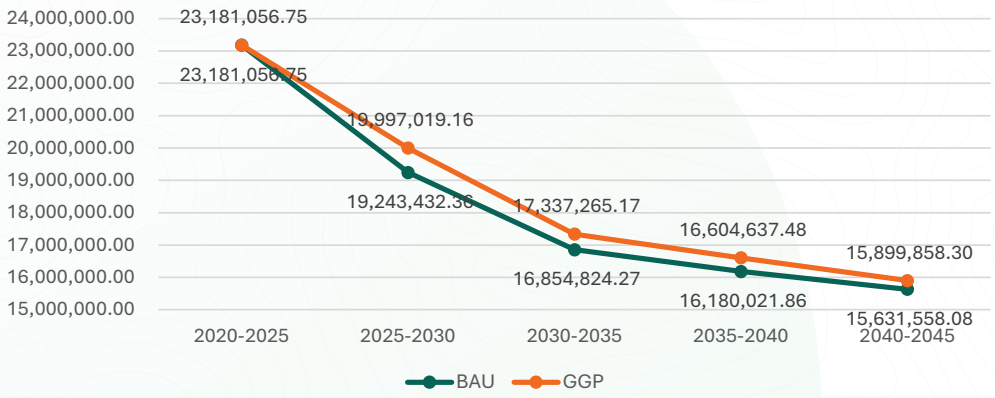


Gambar 16. *Proyeksi Emisi (Nett ton CO2 eq) dari Dekomposisi Gambut (2020-2045)*

Pola ini mencerminkan masih terjadinya proses dekomposisi gambut yang terdrainase dan terakumulasi dari waktu ke waktu, sehingga emisi cenderung masih tinggi meskipun laju peningkatannya mulai menurun. Skenario GGP secara konsisten berada di bawah BAU dengan selisih berkisar 206.935,00 hingga 521.107,50 ton CO_2e per periode, sehingga secara kumulatif selama 2025-2045 mampu menurunkan emisi sebesar 1.74 juta ton CO_2e atau sekitar 0,18% dibandingkan skenario BAU. Dari kondisi awal hingga akhir periode proyeksi, emisi meningkat sekitar 5,33% pada BAU dan 5,11% pada GGP. Selisih yang kecil ini menunjukkan bahwa skema pertumbuhan ekonomi hijau saja belum cukup menekan emisi dari gambut, sehingga diperlukan intervensi yang lebih spesifik pada ekosistem gambut, seperti pembasahan kembali (*rewetting*), pengendalian tinggi muka air, dan restorasi gambut.

- Serapan karbon

Pada kedua skenario, serapan karbon menurun dari 23.181.056,75 ton CO_2e pada periode 2020-2025 menjadi 19.243.432,36 ton CO_2e (BAU) dan 19.997.019,16 ton CO_2e (GGP) pada periode 2025-2030, lalu terus menurun dengan laju yang semakin melandai hingga 15.631.558,08 ton CO_2e (BAU) dan 15.899.858,30 ton CO_2e (GGP) pada periode 2040-2045. Pola ini mencerminkan berkurangnya kapasitas penyerapan karbon seiring berlangsungnya konversi tutupan lahan bervegetasi dan terus berjalannya proses dekomposisi pada ekosistem gambut. Berbeda dengan proyeksi emisi, nilai serapan karbon pada skenario GGP berada di atas BAU, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan kondisi yang lebih baik. Selisih serapan karbon antarskenario mencapai 753.586,80 ton CO_2e pada 2025-2030, kemudian menyempit menjadi 482.440,90 ton CO_2e (2030-2035), 424.615,62 ton CO_2e (2035-2040), dan 268.300,22 ton CO_2e (2040-2045).

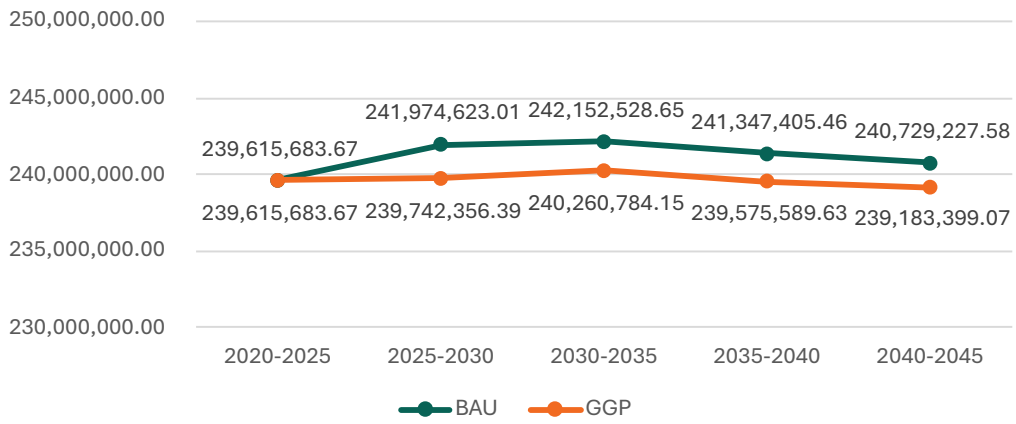


Gambar 17. *Proyeksi serapan karbon (Nett ton CO2 eq) Provinsi Sumatera Selatan (2020-2045)*

Secara kumulatif selama 2025-2045, skema pertumbuhan ekonomi hijau mempertahankan serapan karbon sebesar 1.928.943,54 ton CO_2e lebih tinggi (sekitar 2,84%) dibandingkan BAU. Dari kondisi awal hingga akhir periode, serapan karbon menurun sekitar 32,57% pada BAU dan 31,41% pada GGP, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi hijau mampu memperlambat penurunan serapan karbon, tetapi belum cukup untuk membalikkan tren tersebut. Menyempitnya selisih antarskenario pada periode akhir juga mengindikasikan perlunya penguatan upaya berkelanjutan, seperti perlindungan tutupan hutan, rehabilitasi lahan, dan restorasi ekosistem gambut, agar kapasitas serapan karbon dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

- Emisi Bersih

Proyeksi emisi bersih (emisi dikurangi serapan karbon) dari perubahan penggunaan lahan dan dekomposisi gambut di Provinsi Sumatera Selatan periode 2020-2045, yang membandingkan skenario Business as Usual (BAU) dengan skenario pertumbuhan ekonomi hijau (Green Growth Plan/GGP). Kedua skenario bermula dari titik yang sama pada periode 2020-2025 sebesar 239.61 juta ton CO_2e, kemudian menunjukkan pola yang berbeda. Pada skenario BAU, emisi bersih meningkat menjadi 241.97 juta ton CO_2e (2025-2030) dan mencapai puncaknya sebesar 242.15 juta ton CO_2e (2030-2035), sebelum menurun perlahan menjadi 240.73 juta ton CO_2e pada periode 2040-2045.



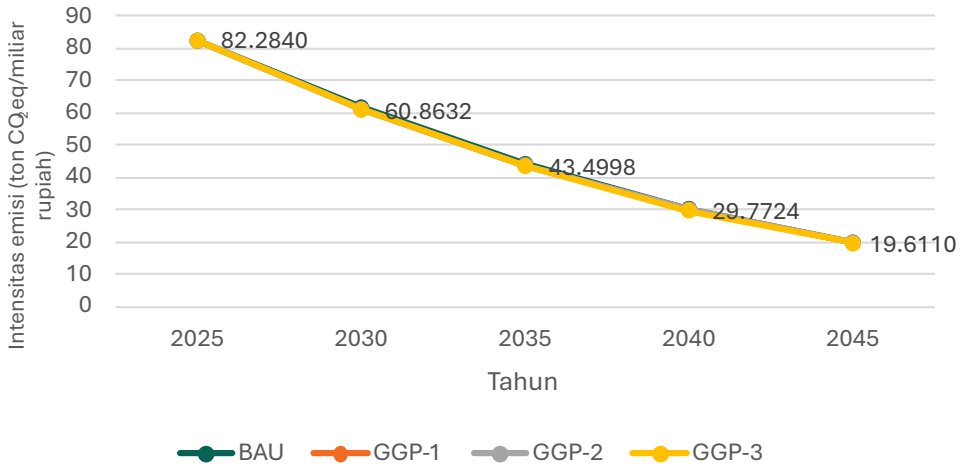
Gambar 18. *Proyeksi emisi bersih (Nett ton CO2 eq) Provinsi Sumatera Selatan (2020-2045)*

Pada skenario GGP, emisi bersih relatif stabil, yaitu 239.742.356,39 ton CO_2e (2025-2030) dengan puncak yang jauh lebih rendah sebesar 240.26 juta ton CO_2e (2030-2035), lalu menurun hingga 239.18 juta ton CO_2e pada 2040-2045, yang berada di bawah kondisi awal. Selisih emisi bersih antarskenario mencapai 2.23 juta ton CO_2e pada 2025-2030, kemudian menyempit menjadi 1.89 juta ton CO_2e (2030-2035), 1.77 juta ton CO_2e (2035-2040), dan 1.54 juta ton CO_2e (2040-2045). Secara kumulatif selama 2025-2045, skenario GGP mampu menurunkan emisi bersih sebesar 7.44 juta ton CO_2e atau sekitar

0,77% dibandingkan skenario BAU. Dari kondisi awal hingga akhir periode, emisi bersih pada skenario BAU meningkat sekitar 0,46%, sedangkan pada skenario GGP menurun sekitar 0,18%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi hijau mampu menahan peningkatan emisi bersih dan membalik arah tren pada periode akhir.

- Intensitas emisi gas rumah kaca

Intensitas emisi adalah ukuran jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan untuk setiap satuan output ekonomi, dalam hal ini diukur dalam ton CO_2eq per miliar rupiah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator ini menunjukkan seberapa efisien suatu perekonomian dalam menghasilkan nilai tambah dengan emisi yang dilepaskan. Semakin rendah nilainya, semakin sedikit emisi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu satuan output ekonomi. Penurunan intensitas emisi menandakan terjadinya proses *decoupling*, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak lagi diikuti kenaikan emisi dengan laju yang sama.

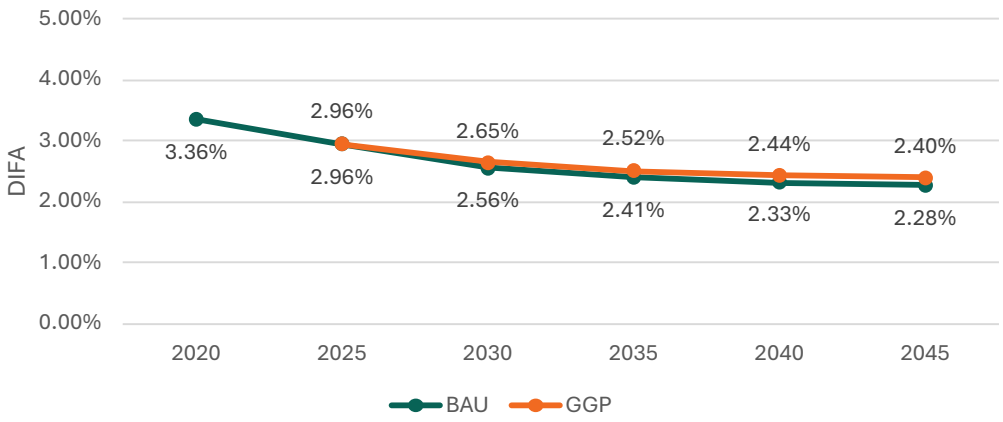


Gambar 19. *Proyeksi intensitas emisi dengan skenario BAU dan GGP (2025-2045)*

Secara keseluruhan, intensitas emisi turun sekitar 75,8% dari 2025 ke 2045 pada skenario BAU. Pada skenario GGP-3, penurunannya mencapai sekitar 76,2%. Selisih antara GGP-3 dan BAU pada 2045 adalah sekitar 0,34 ton CO_2eq/miliar rupiah (sekitar 1,7%). Selisih ini cenderung kecil karena tren penurunan yang sudah sangat kuat pada BAU, namun tetap menunjukkan tambahan manfaat dari intervensi kebijakan pertumbuhan hijau. Karena emisi gambut cenderung berfluktuasi dan sangat dipengaruhi tata kelola air serta kebakaran, upaya pengendalian emisi dari lahan gambut menjadi faktor penting agar penurunan intensitas emisi pada skenario GGP dapat terus diperkuat.

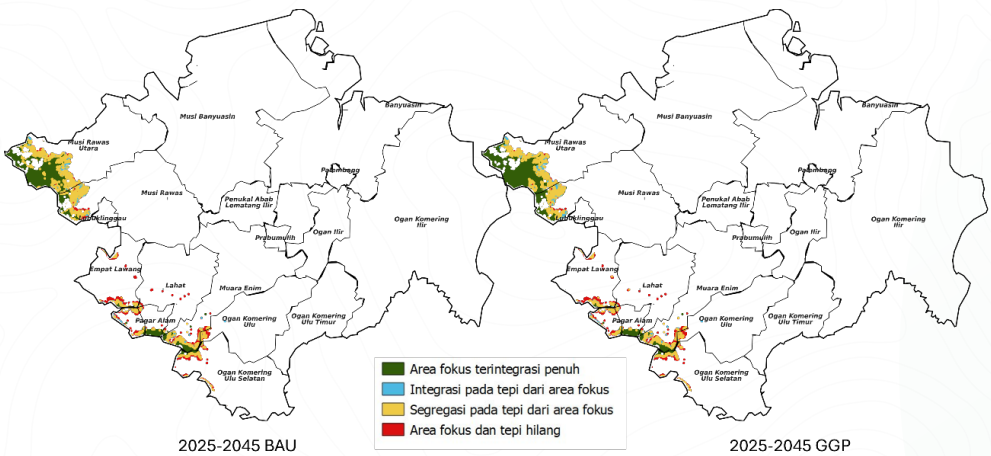
4.4 Kehati

Kondisi keanekaragaman hayati dapat dilihat melalui *Degree of Integration of Focal Area* (DIFA). DIFA menilai seberapa kompak susunan dan komposisi ekosistem alami di dalam bentang lahan berdasarkan kemiripan area inti dan tepinya menggunakan nilai *Total Edge Contrast Index* (TECI). Ekosistem alami yang dilihat adalah hutan lahan kering primer atau ekosistem hutan primer terestrial, yang diasumsikan menjadi area dengan keanekaragaman hayati tinggi. Proyeksi nilai DIFA Sumatera Selatan dapat dilihat pada Gambar 20.



Gambar 20. *Proyeksi nilai DIFA dengan skenario BAU dan GGP (2025-2045)*

Dalam konteks Sumatera Selatan, ekosistem ini tersebar di bagian barat dengan luasan yang relatif sedikit. Merujuk pada dokumen Masterplan 2017-2030, kualitas dan konfigurasi habitat di dalam lanskap sudah disimulasikan akan menurun hingga 3,48% di tahun 2030.



Gambar 21. *Proyeksi perubahan Total Edge Contrast Index tahun 2025-2045 melalui dua skenario: BAU (kiri) dan GGP (kanan)*

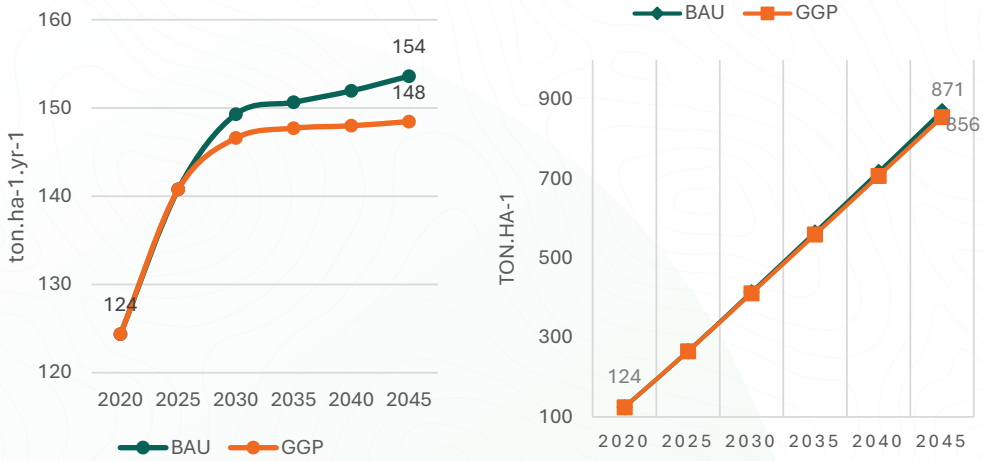
Simulasi BAU akan menurunkan derajat integrasi hingga 2,28% di tahun 2045. Artinya, area ekosistem yang penting bagi keanekaragaman hayati di Sumatera Selatan akan semakin terfragmentasi. Melalui skenario GGP, penurunan ini dapat ditopang hingga membaik di angka 2,40%. Dapat dilihat pada Gambar 21, area di sekitar wilayah barat terdapat beberapa area yang dipertahankan derajat integrasinya.

4.5 Biofisik

- Erosi lahan

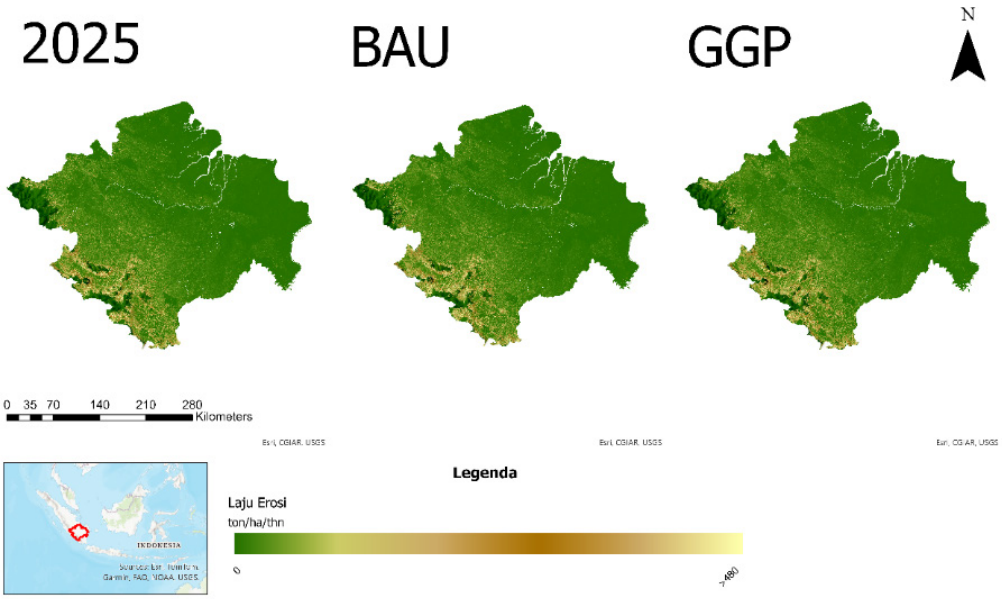
Kondisi ancaman degradasi lahan dapat dievaluasi melalui proyeksi Laju Erosi dan Akumulasi Kehilangan Tanah.

Berdasarkan hasil simulasi, laju erosi pada tahun awal pengamatan (2020) tercatat sebesar 124 ton/ha/tahun. Simulasi Business As Usual (BAU) menunjukkan bahwa laju erosi akan terus mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 154 ton/ha/tahun pada tahun 2045. Peningkatan laju ini berdampak langsung pada besarnya akumulasi kehilangan tanah yang diproyeksikan mencapai 871 ton/ha di akhir periode tersebut. Melalui skenario *Green Growth Plan* (GGP), tren pemburukan ini dapat ditekan sehingga laju erosi pada tahun 2045 berhasil ditahan di angka 148 ton/ha/tahun, dengan total akumulasi kehilangan tanah yang lebih rendah yakni sebesar 856 ton/ha.



Gambar 22. *Laju erosi (kiri) dan akumulasi kehilangan tanah (kanan)*

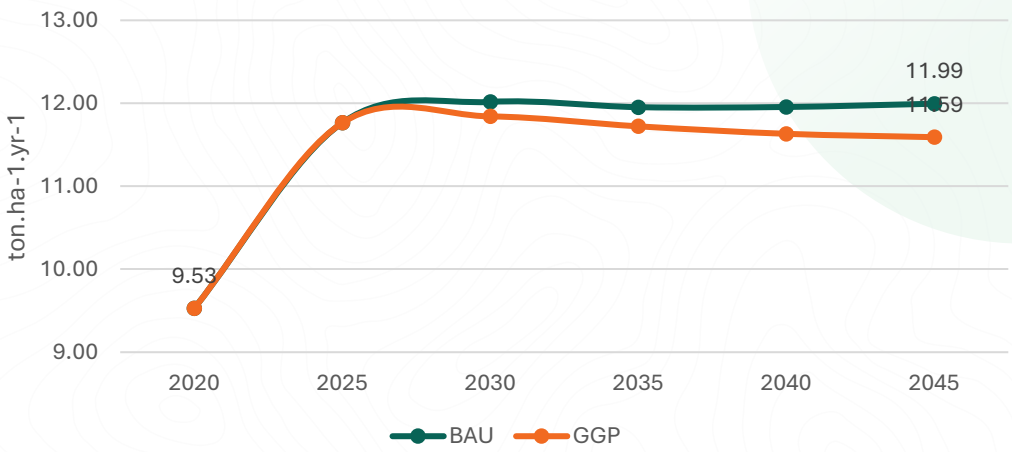
Dalam konteks spasial, tingkat kerentanan lahan terhadap erosi tersebar secara tidak merata. Peta distribusi memperlihatkan bahwa area dengan laju erosi tertinggi—yang ditunjukkan dengan gradasi warna kuning hingga cokelat (mencapai lebih dari 480 ton/ha/tahun)—terkonsentrasi secara dominan di wilayah bagian barat hingga barat daya lanskap. Merujuk pada proyeksi spasial, skenario BAU memperlihatkan potensi perluasan area kritis degradasi di wilayah barat tersebut dibandingkan dengan kondisi awal di tahun 2025. Sebaliknya, penerapan skenario GGP secara visual menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mempertahankan kondisi tutupan lahan dan meredam laju erosi di kawasan dengan topografi rentan tersebut.



Gambar 23. *Sebaran laju erosi tahun 2025, skenario BAU dan GGP*

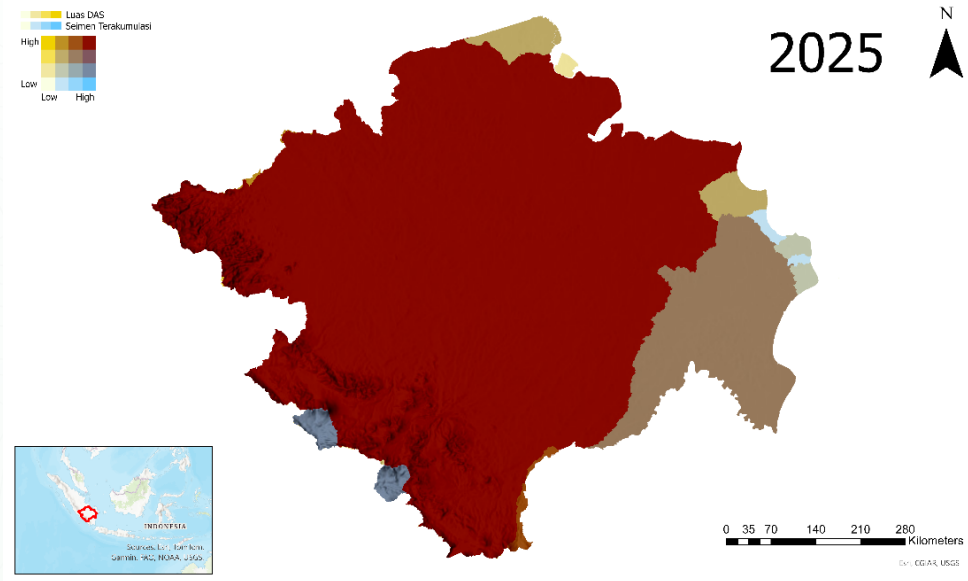
- Sedimentasi

Dampak turunan dari proses erosi dapat dievaluasi melalui proyeksi Laju Sedimentasi pada tingkat Daerah Aliran Sungai (DAS). Berdasarkan grafik simulasi, laju sedimentasi awal pada tahun 2020 tercatat pada angka 9,53 ton/ha/tahun. Laju ini diproyeksikan mengalami lonjakan yang cukup tajam hingga tahun 2025 sebelum akhirnya melandai. Pada akhir periode simulasi di tahun 2045, skenario Business As Usual (BAU) memperlihatkan laju sedimentasi yang tertahan di angka 11,99 ton/ha/tahun. Melalui intervensi skenario *Green Growth Plan* (GGP), laju peningkatan ini dapat sedikit ditekan sehingga turun menjadi 11,59 ton/ha/tahun pada tahun 2045.



Gambar 24. *Laju sedimentasi skenario BAU dan GGP*

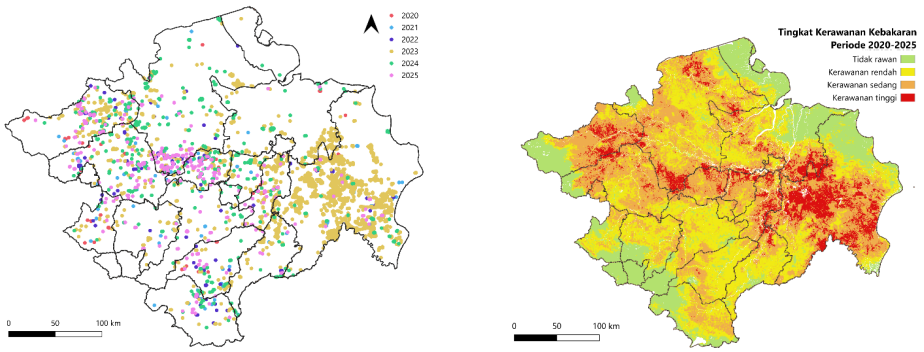
Secara akumulatif dan distribusi keruangan, beban sedimentasi sangat didominasi oleh DAS berskala besar, khususnya DAS Musi. Pada proyeksi BAU tahun 2045, DAS Musi diperkirakan menyumbang sedimen terbesar hingga melebihi 79 juta ton, sementara skenario GGP mampu sedikit menurunkannya menjadi sekitar 78,8 juta ton pada tahun yang sama. Selain Musi, DAS lain seperti Manna dan Luas juga mencatatkan akumulasi volume sedimen yang signifikan di kisaran 3 hingga 4,9 juta ton per tahun. Kondisi ini terkonfirmasi oleh peta sebaran spasial tahun 2025 yang menggunakan legenda bivariat, di mana area tengah dan sebagian besar bentang alam didominasi oleh warna merah gelap. Warna ini merepresentasikan korelasi langsung antara luasan DAS yang sangat besar dengan tingginya akumulasi sedimen di wilayah tersebut.



Gambar 25. *Peta sebaran sedimentasi tahun 2025*

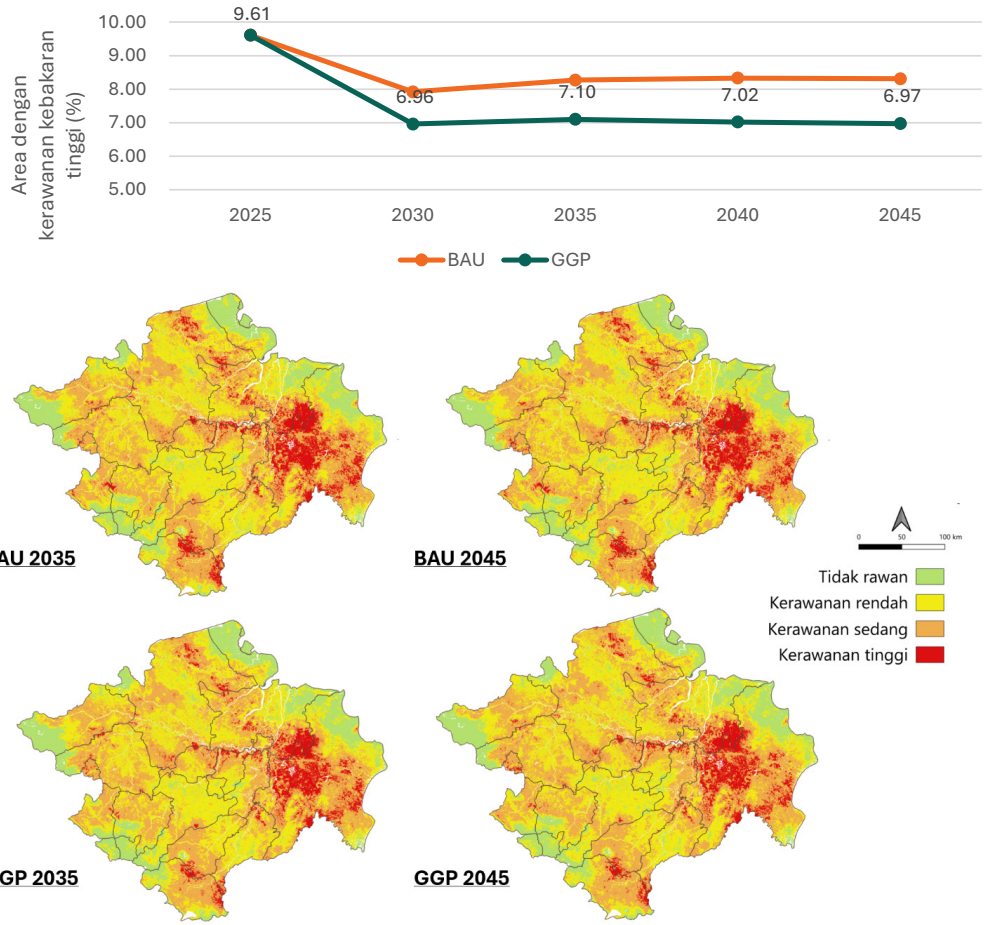
- Risiko rawan kebakaran hutan dan lahan

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu ancaman bencana tahunan paling kritis di Provinsi Sumatera Selatan, terutama akibat kondisi biofisik bentang alamnya yang mencakup ekosistem rawa gambut seluas 24.07% dari total wilayah provinsi. Kandungan material organik tebal yang terdegradasi dan mengering saat musim kemarau, diperparah oleh anomali iklim seperti fenomena El-Niño, menjadikan kawasan ini sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Guna mengantisipasi dinamika risiko jangka panjang, pemodelan berbasis *Maximum Entropy* (MaxEnt) multi-temporal dikembangkan dengan mengintegrasikan titik api historis 2020–2025 (NASA FIRMS MODIS), faktor biofisik, iklim, dan jarak dinamis terhadap tutupan lahan untuk memproyeksikan kerentanan kebakaran pada skenario *Business as Usual* (BAU) dan *Green Growth Plan* (GGP) periode 2025–2045 Gambar 26.



Gambar 26. *Peta Sebaran Titik Kejadian Kebakaran Periode 2020–2025 (Sumber: NASA FIRMS, MODIS Collection 6.1)* (kiri) dan Peta Kerawanan Kebakaran Historis Periode 2020-2025 (kanan).

Hasil simulasi kerawanan kebakaran ditunjukkan oleh Gambar 27. Pada periode historis 2020-2025, luasan kelas kerawanan tinggi di Sumatera Selatan tercatat mencapai 810.311 ha (9,61% dari luas provinsi), dengan konsentrasi titik kebakaran terpadat berada di bentang rawa gambut bagian timur seperti Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Banyuasin, dan Musi Banyuasin. Memasuki periode proyeksi pada skenario BAU, meskipun sempat menurun pada tahun 2030 (667.339 ha atau 7,92%) seiring dinamika awal tutupan lahan, luas lahan dengan kerawanan tinggi kembali meningkat hingga melampaui 700.000 ha (8,31%–8,33%) pada rentang 2040–2045. Sebaliknya, skenario GGP secara konsisten mampu menekan kerawanan tinggi jauh di bawah kondisi BAU, bertahan stabil di bawah 7,10% sepanjang periode waktu proyeksi. Hasil ini menunjukkan bagaimana implementasi GGP dapat turut mengurangi potensi kerawanan Sumatera Selatan terhadap bencana kebakaran dibandingkan kondisi BAU di masa mendatang.

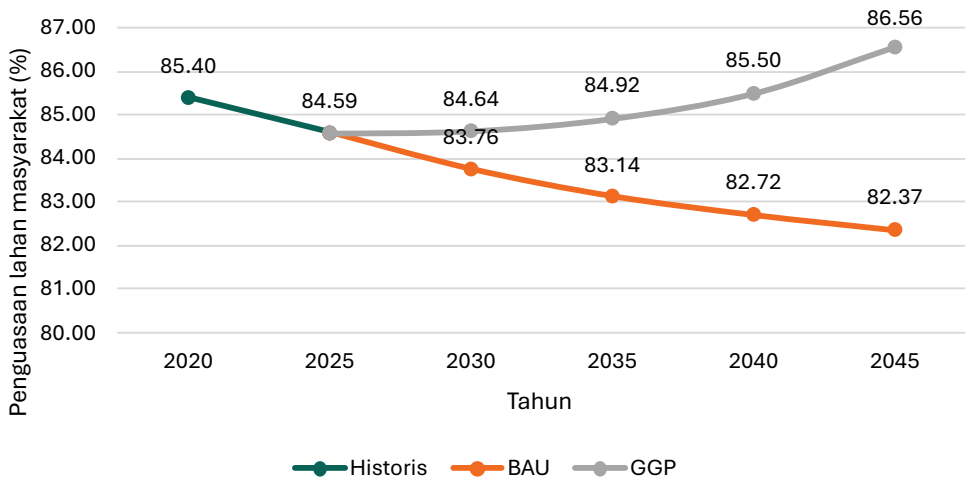


Gambar 27. *Persentase Area dengan Kerawanan Tinggi (atas) dan Peta Proyeksi Kerawanan Kebakaran Hingga Tahun 2045 (bawah).*

4.6 Sosial-Ekonomi

- Penguasaan lahan oleh masyarakat

Indikator penguasaan lahan masyarakat menggambarkan proporsi atau tingkat akses serta kontrol langsung masyarakat atas keberadaan lahan produktif seperti pertanian, kebun rakyat, kebun monokultur, dan agroforestri dibandingkan dengan total luas keseluruhan lahan produktif. Indikator ini disusun untuk mengukur sejauh mana kebijakan penataan ruang dan alokasi lahan khususnya melalui integrasi skema Perhutanan Sosial dan penataan kawasan perizinan menjamin keadilan akses ruang bagi masyarakat lokal secara berkelanjutan. Nilai rasio yang tinggi mengindikasikan semakin dominannya ruang kelola berbasis masyarakat.



Gambar 28. *Proyeksi nilai penguasaan lahan masyarakat dengan skenario BAU dan GGP (2025-2045)*

Berdasarkan hasil analisis proyeksi penguasaan lahan masyarakat periode 2020–2045, menunjukkan kondisi historis sebesar 85,40% (2020) dan 84,59% (2025). Namun, pada skenario *Business As Usual* (BAU) tanpa adanya intervensi kebijakan, porsi penguasaan lahan oleh masyarakat diproyeksikan mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga menyentuh 82,37% pada 2045. Sebaliknya, penerapan skenario *Green Growth Plan* (GGP) mampu membalikkan arah tren secara positif dan berkelanjutan. Melalui penguatan intervensi kebijakan, porsi penguasaan lahan oleh masyarakat berhasil ditingkatkan secara bertahap mulai tahun 2030 sebesar 84,64% hingga mencapai 86,56% pada tahun 2045. Pada akhir periode proyeksi (tahun 2045), terdapat selisih sebesar 4,19% antara skenario GGP (86,56%) dan skenario BAU (82,37%). Hal ini menunjukkan bahwa skenario GGP tidak hanya efektif dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan, tetapi juga mampu menjamin kepastian hak lahan serta memperluas akses keadilan ruang bagi masyarakat.

5

Intervensi Keruangan Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Prioritas keruangan diturunkan dari pertemuan antara kebutuhan peningkatan penghidupan, kesesuaian lahan, fungsi lindung, kondisi ekosistem, dan keterhubungan hulu–hilir. Peta pada Bab 4 merupakan keluaran skenario; peta tersebut belum merupakan penetapan lokasi program. Lokasi operasional perlu diverifikasi dengan data resmi, pemerintah kabupaten/kota, pemegang hak, dan masyarakat sebelum dituangkan ke dalam rencana kerja dan anggaran.

5.1 Dasar pemilihan lokasi

Unit pelaksanaan menggunakan desa atau kelompok usaha yang dapat dipetakan, ditempatkan dalam konteks sub-DAS, Kesatuan Hidrologis Gambut, atau rantai pasok. Kabupaten yang disebut berikut merupakan orientasi penapisan, bukan penetapan lokasi. Verifikasi tapak mencakup penguasaan lahan, kondisi biofisik, penerima manfaat, kesiapan kelembagaan, dan kesediaan para pihak.

5.2 Prioritas lanskap dan komoditas

Rincian orientasi wilayah dan penapisan disajikan pada Lampiran 2. Sumber arahan wilayah adalah RPJPD bagian 2.1, 3.1.2–3.1.5, dan 3.1.8, serta pola tutupan lahan dalam draf pembaruan. Batas lokasi operasional memerlukan verifikasi peta dan lapangan.

5.3 Aturan penapisan dan pemetaan

Penyaringan awal mengecualikan lokasi yang bertentangan dengan fungsi lindung, status kawasan, atau hak yang sah. Pemilihan berikutnya mempertimbangkan kebutuhan ekologis dan sosial, kelayakan teknis, akses pasar, biaya, serta kapasitas pelaksana. Konflik tenurial dicatat dan ditangani sebelum investasi fisik. Penilaian prioritas dan alasan pemilihan lokasi dipublikasikan dalam bentuk yang dapat ditelaah para pihak.

Setiap poligon intervensi memiliki kode lokasi, luas, tahun data, sumber peta, tipe ekosistem, status tenurial,



Gambar 29. *Area kelola masyarakat di Sumatera Selatan*

aktivitas, penanggung jawab, dan indikator hasil. Peta harus menampilkan skala, sistem koordinat, legenda, serta tanggal pemutakhiran. Satu lokasi dapat memuat beberapa kegiatan, tetapi luas dan penerima manfaat tidak dijumlahkan berulang. Peta rekomendasi GGP menjadi masukan perencanaan dan tidak mengubah peruntukan ruang secara langsung.

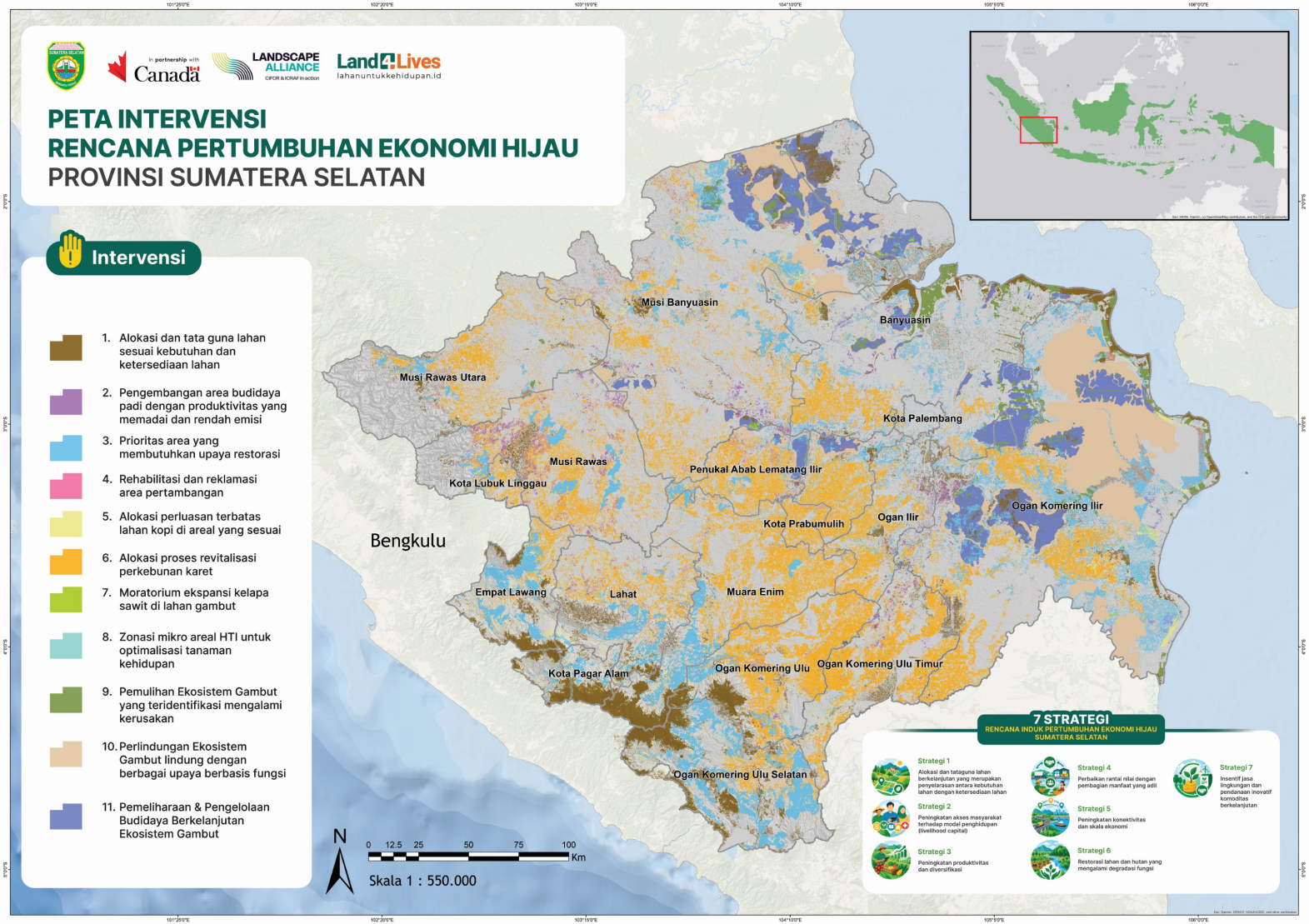
5.4 Penghubung prioritas dengan rencana kerja

Setiap usulan lokasi diterjemahkan menjadi paket kegiatan yang memuat kondisi awal, volume, biaya investasi dan pemeliharaan, jadwal, sumber dana, penerima manfaat, serta penanggung jawab. Bappeda mengoordinasikan penyelarasan lintas perangkat daerah dan kabupaten/kota. Kegiatan yang belum memiliki kejelasan lokasi, hak kelola, biaya pemeliharaan, atau hasil yang diukur ditempatkan pada tahap persiapan, sebelum pengadaan atau pembangunan.

5.5 Peta Intervensi

Secara keruangan pembaruan GGP ini menunjukan bahwa area intevensi secara keruangan direkimendasikan sebagai berikut.

Gambar 30. *Peta Intervensi*



Area Intervensi	Kabupaten	Intervensi 1	Intervensi 2	Intervensi 3	Intervensi 4	Intervensi 5	Intervensi 6	Intervensi 7	Intervensi 8	Intervensi 9	Intervensi 10	Intervensi 11	Intervensi 12
		Alokasi akses pinjam-pakai kawasan hutan untuk penghidupan	Alokasi akses-kepemilikan APL melalui pelepasan kawasan hutan	Alokasi dan tata guna lahan sesuai kebutuhan dan ketersediaan lahan	Alokasi perluasan terbatas lahan kopi di areal yang sesuai	Alokasi proses revitalisasi perkebunan karet	Moratorium ekspansi kelapa sawit di lahan gambut	Pemeliharaan & Pengelolaan Budidaya Berkelanjutan Ekosistem Gambut	Pemulihan Ekosistem Gambut yang terindentifikasi mengalami kerusakan	Perlindungan Ekosistem Gambut lindung dengan berbagai upaya	Prioritas area yang membutuhkan upaya restorasi	Rehabilitasi dan reklamasi area pertambangan	Zonasi mikro areal HTI untuk optimalisasi tanaman kehidupan
Ringkasan estimasi area intervensi indikatif untuk alokasi dan tata guna lahan yang menyelaraskan kebutuhan dan ketersediaan lahan	Banyuasin	23.328,62	1.086,24	58.747,92	616,26	74.706,20	1.706,79	112.482,47	51.992,59	34.146,62	76.274,02	32,93	97,03
	Empat Lawang	5.221,39	27,00	22.177,26	14.996,22	18.771,36					40.616,45		1.558,41
	Kota Lubuk Linggau	300,42		582,24	331,87	12.859,94					1.691,63		
	Kota Pagar Alam	1.838,18		18.604,05	4.032,30	20,23					8.633,10		
	Kota Palembang	330,14		34,88		1.593,25					2.400,87		
	Kota Prabumulih	139,81	34,47	1,00	105,11	26.140,56					1.442,40		
	Lahat	9.975,75	317,00	34.241,67	21.493,60	53.504,01					38.407,20	71,00	1.321,50
	Muara Enim	9.132,03	1.024,12	41.520,63	7.708,10	214.551,29	6,00	8.194,59	318,66	6.080,58	62.216,08	31,05	513,62
	Musi Banyuasin	20.016,83	15.220,62	16.527,36	9.639,17	140.327,84	3.104,99	96.817,27	12.551,44	102.138,39	89.077,66	13,07	37,00
	Musi Rawas	10.719,58	286,20	1.630,26	305,21	120.808,22		215,30	125,09	2.606,20	34.419,74	1,00	18,00
	Musi Rawas Utara	5.493,09	3.912,04	4.664,33	666,76	78.299,47	7,00	22,70	1.654,91	48,23	16.559,67	3,00	117,00
	Ogan Ilir	11.741,55		52,00	677,74	60.930,10					19.324,84		
	Ogan Komering Ilir	34.761,12	16.757,30	39.879,74	13.101,43	157.319,79	1.429,00	143.597,90	36.346,89	389.265,00	193.274,65		67,78
	Ogan Komering Ulu	8.015,78	665,44	26.641,68	6.717,37	143.171,07					20.290,63	36,95	2.069,77
	Ogan Komering Ulu Selatan	18.290,78	530,60	54.734,98	10.748,88	28.961,51					102.541,45	63,00	1.633,41
	Ogan Komering Ulu Timur	14.488,36	306,59	216,63	6.374,67	119.384,09					5.232,99		659,05
	Penukal Abab Lematang Ilir	1.376,45	61,01	56,86	92,44	68.931,06	60,23	10.941,44	1.055,17	9.590,95	15.883,95		115,00
	Total	175.541,31	40.322,07	324.488,58	98.070,17	1.320.327,35	6.314,01	372.271,66	104.083,19	543.875,97	728.354,30	252,00	8.217,01

6

Penutup

Pelaksanaan pembaruan GGP perlu menempatkan kenaikan nilai tambah dan penghidupan rakyat dalam batas daya dukung lingkungan. Hasil model memperlihatkan manfaat tambahan dibandingkan BAU, tetapi kehilangan tutupan hutan dan emisi dekomposisi gambut masih memerlukan penanganan yang lebih kuat. Prioritas diarahkan pada produktivitas kebun eksisting, hilirisasi yang layak, pemulihan tata air, perlindungan habitat, serta pembagian manfaat yang dapat diverifikasi.

6.1 Pengorganisasian pelaksanaan

Pemerintah provinsi melalui Bappeda mengoordinasikan integrasi GGP ke dalam perencanaan, didukung perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup, kehutanan, perkebunan, pertanian, kelautan dan perikanan, pekerjaan umum, perindustrian, koperasi, serta keuangan daerah. Penugasan mengikuti kewenangan dan nomenklatur organisasi yang berlaku. Pemerintah kabupaten/kota menerjemahkan prioritas ke lokasi dan rencana kerja; KPH, pemerintah desa, kelompok usaha, pemegang kelola, dan mitra mendukung pelaksanaan serta pemeliharaan di tapak.

Forum koordinasi menggunakan mekanisme yang tersedia untuk meninjau lokasi, menyelesaikan hambatan lintas sektor, dan memeriksa kemajuan. Pemerintah pusat dan instansi vertikal dilibatkan untuk urusan di luar kewenangan provinsi, termasuk pertanahan, kawasan konservasi, dan persetujuan tertentu. Dukungan swasta diikat dengan kesepakatan kegiatan, transparansi pembiayaan, standar lingkungan, dan pembagian manfaat.

6.2 Tahapan pelaksanaan hingga 2045

Pada periode 2025–2029, fokus diarahkan pada konsolidasi data dasar, verifikasi lokasi, penyelarasan program, penguatan pendampingan, serta pengujian paket intervensi. Kegiatan yang sudah berjalan diinventarisasi menurut tahun mulai dan hasilnya. Pada 2030–2034, perluasan dilakukan pada intervensi yang menunjukkan hasil dan kelayakan pembiayaan. Pada 2035–2039, integrasi rantai nilai dan pemulihan ekosistem diperkuat lintas wilayah. Pada 2040–2045, evaluasi menekankan keberlanjutan manfaat, pemeliharaan, dan penyesuaian terhadap risiko iklim. Pembagian ini merupakan usulan operasional GGP yang perlu diselaraskan dengan tahapan resmi RPJPD.

6.3 Pembiayaan dan kelayakan investasi

Pembiayaan disusun dari kebutuhan kegiatan dan kewajiban pemeliharaan. APBD dan sumber publik lain digunakan sesuai kewenangan; pembiayaan usaha dipertimbangkan berdasarkan arus kas, kemampuan membayar, dan risiko. Dukungan perusahaan dan mitra dicatat agar tidak menggantikan kewajiban lingkungan yang sudah melekat. Proyek jasa lingkungan atau karbon hanya dimasukkan sebagai sumber pendapatan setelah kelayakan, hak, biaya transaksi, mekanisme verifikasi, dan pembagian manfaatnya jelas.

6.4 Pemantauan dan evaluasi

Pemantauan tahunan membedakan keluaran kegiatan, hasil intervensi, dan dampak tingkat provinsi. Setiap indikator memiliki definisi, satuan, nilai dasar dan tahun, cakupan lokasi, sumber data, frekuensi, serta penanggung jawab. Target disusun dari kondisi awal dan kemampuan pelaksanaan; tidak diturunkan langsung dari hasil simulasi. Data penerima manfaat dipilah menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan kategori kerentanan yang relevan tanpa membuka informasi pribadi.

Evaluasi lima tahunan memeriksa konsistensi antara rencana dan pelaksanaan, biaya per hasil, distribusi manfaat, serta perubahan tekanan lingkungan. Perubahan luas tutupan, emisi, dan pendapatan dibandingkan dengan nilai dasar dan faktor eksternal, termasuk harga komoditas, iklim, dan kebijakan. Peningkatan indikator agregat tidak langsung dianggap sebagai dampak program tanpa analisis pembanding yang memadai. Temuan digunakan untuk menyesuaikan lokasi, paket dukungan, dan asumsi skenario.

6.5 Tindak lanjut prioritas

Tindak lanjut diarahkan pada pengesahan pembagian peran, penyusunan daftar lokasi dan data dasar, penetapan target yang berbiaya, serta pengintegrasian kegiatan ke rencana perangkat daerah. Secara teknis, tabel model perlu direkonsiliasi untuk definisi tenaga kerja, harga dan tahun dasar PDRB, DIFA, satuan keuntungan usaha tani, serta periode neraca emisi. Langkah ini memastikan hasil simulasi dan pemantauan lapangan digunakan sesuai fungsinya sebelum menjadi dasar klaim capaian atau pembiayaan berbasis hasil.

Daftar Pustaka

Anderson, Z. R., Nasir, J., & co-authors (2016). *Green growth rhetoric versus reality: Insights from Indonesia.* Energy Policy, 96, 250–259. DOI: 10.1016/j.enpol.2016.05.022

Asyrof, R. A., & Rizaldi, M. (2025). *Regional inclusive green growth in Indonesia: Unraveling determinants.*

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2021. *Tabel Input-Output Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016*. Palembang, BPS Provinsi Sumatera Selatan.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2026a. *Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Selatan Agustus 2025*. Palembang, BPS Provinsi Sumatera Selatan.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2026b. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Menurut Lapangan Usaha 2021–2025*. Palembang, BPS Provinsi Sumatera Selatan.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2026c. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan Menurut Lapangan Usaha 2021–2025*. Palembang, BPS Provinsi Sumatera Selatan.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2026d. *Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2026*. Palembang, BPS Provinsi Sumatera Selatan.

Bagheri, M., & co-authors (2018). *Green growth planning: A multi-factor energy input-output approach.* Economic Analysis and Policy, 59, 83–94. DOI: 10.1016/j.eap.2018.04.001

Bappenas (2022). *Green Economy Index, A Step Forward to Measure the Progress of Low Carbon & Green Economy in Indonesia.* Bappenas/ LCDI Indonesia Report.

Barbier, E. B. (2019). *The concept of sustainable economic development.* Environmental Conservation, 46(4), 289–300. DOI: 10.1017/S037689291900021X

Daly, H. E., & Farley, J. (2010). *Ecological economics: Principles and applications.* Island Press. DOI: 10.5822/978-1-61091-463-9

Dewi et al. (2015). *Negotiation Support Tools to Enhance Multifunction Landscapes.* Book Chapter; Climate-Smart Landscape: Multifunctionality in Practices. Nairobi, Kenya: World Agroforestry (ICRAF).

Dewi, S., Mulia, R., Johana, F., Ekadinata, A., & van Noordwijk, M. (2023). *Integrating relational and instrumental values of nature in planning land use for multiple ecosystem services (LUMENS): Tools and process.* Current Opinion in Environmental Sustainability, 64, 101333. DOI: 10.1016/j.cosust.2023.101333

Hughes, T. P., Barnes, M. L., Bellwood, D. R., Cinner, J. E., Cumming, G. S., Jackson, J. B. C., … Scheffer, M. (2017). *Coral reefs in the Anthropocene.* Nature, 546(7656), 82–90. DOI: 10.1038/nature22901

ICRAF. 2017. Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan. Disiapkan untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan dukungan IDH. Berkas rujukan Dokumen Masterplan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan 2017–2030.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2018). *Global warming of 1.5°C.* IPCC Special Report.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023). *Berkomitmen atasi perubahan iklim, ini upaya yang dilakukan Indonesia.* Publikasi Resmi Kemenkeu RI.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2024). *SIGAP: Sistem Informasi Geospasial.* KLHK RI.

Leakey, R. R. B. (2014). *The role of agroecology in the multifunctional agricultural transition.* Agroecology and Sustainable Food Systems, 38(5), 535–552. DOI: 10.1080/21683565.2013.870629

Noordwijk, M., Coe, R., & Sinclair, F. L. (2016). *Central hypotheses for the third agroforestry paradigm within a common definition.* Agriculture, Ecosystems & Environment, 284, 164–175. DOI: 10.1016/j.agee.2019.106583

Nugraha, A., Indiarto, D., Dewi, S., & Ekadinata, A. (2015). *Land-Use Planning for Multiple Environmental Services (LUMENS).* Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF).

OECD (2011). *Towards Green Growth.* OECD Green Growth Studies, OECD Publishing, Paris. DOI: 10.1787/9789264111318-en

OECD (2017). *Green Growth Indicators 2017.* OECD Green Growth Studies, OECD Publishing, Paris. DOI: 10.1787/9789264268586-en

OECD (2019). *OECD Green Growth Policy Review of Indonesia 2019.* OECD Publishing. DOI: 10.1787/aa9c4c40-en

Partnership for Action on Green Economy (PAGE) (2016). *Green growth planning guidelines.* United Nations Environment Programme.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 2023. *Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan*. Palembang, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 2024. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2045. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 2024a. *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan*

Lingkungan Hidup. Palembang, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 2024b. *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024–2044*. Palembang, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 2024c. *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2045*. Palembang, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 2025a. *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029*. Palembang, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 2025b. *Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029*. Palembang, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Stern, N. (2007). *The economics of climate change: The Stern review.* Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511817434

UNEP (2011). *Towards a green economy: Pathways to sustainable development and poverty eradication.* United Nations Environment Programme.

United Nations (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development.* United Nations SDGs.

World Bank (2012). *Inclusive green growth: The pathway to sustainable development.* World Bank. DOI: 10.1596/978-0-8213-9733-0

Regulasi dan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2023) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian. Jakarta: Kementerian Pertanian.

Lampiran-1. Strategi, Intervensi, dan Indikator

Strategi 1. Alokasi dan Tata Guna Lahan yang Inklusif, Integratif dan Berdasarkan Informasi

Intervensi	Aktivitas	Indikator
1.1. Alokasi dan tata guna lahan sesuai kebutuhan, ketersediaan lahan, dan integrasinya dengan berbagai fungsi	1.1.1 Mengembangkan dan mengoperasionalisasikan secara berkelanjutan sistem satu peta	1. Luas kawasan lindung dan HCV yang tidak mengalami deforestasi dan degradasi tidak berkurang (ha) 2. Luas ekspansi komoditas di areal legal dan sesuai kesesuaian lahan (ha) 3. Peta Satu Data tersedia dan digunakan sebagai acuan perizinan
	1.1.2 Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sistem satu peta	
	1.1.3 Memutakhirkan, fasilitasi keterbukaan akses, dan interoperatbilitas data	
	1.1.4 Memutakhirkan berbagai analisis pengelolaan bentang alam dan lingkungan seperti kesesuaian lahan, area preservasi, gambut sebagai dasar revisi RTRW dan perencanaan lainnya	
	1.1.5 Memetakan dan menetapkan prioritas desa tertinggal melalui peraturan daerah	
	1.1.6 Menetapkan zona penggunaan dan lindung berdasarkan analisis kesesuaian lahan, HCV, HCS, dan fungsi lindung gambut	
	1.1.7 Mengintegrasikan peta sebaran sumber air, jaringan air, dan pos pemantauan dalam penataan ruang	
	1.1.8 Membuat kebijakan insentif dan disinsentif berbasis jasa lingkungan untuk petani kecil dan perusahaan yang mempertahankan HCV/HCS, dan Ekosistem penting lainnya yang mendukung jasa lingkungan.	
1.2. Alokasi akses perhutanan sosial untuk penghidupan masyarakat desa tertinggal	1.2.1 Menambahkan area Perhutanan Sosial pada lokasi desa tertinggal ke dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	1. Luas area Perhutanan Sosial yang dialokasikan untuk desa tertinggal bertambah (ha) 2. Jumlah izin Perhutanan Sosial yang diterbitkan bertambah 3. Persentase konflik lahan yang berhasil dimediasi bertambah 4. Luas PS aktif dikelola bertambah 5. Jumlah KUPS yang naik kelas bertambah 6. Nilai usaha PS meningkat 7. Jumlah kelompok PS yang masuk pembiayaan hijau/PJL bertambah.
	1.2.2 Mengharmonisasikan dan memutakhirkan PIAPS dengan RTRW secara berkala	
	1.2.3 Mengadakan kajian tipologi Perhutanan Sosial dan aktivitas penghidupan masyarakat setempat (HHBK, kayu, jasa lingkungan)	
	1.2.4 Memetakan dan mengelola konflik lahan di kawasan hutan (rekonsiliasi, mediasi, resolusi)	
	1.2.5 Memperkuat peran Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial di tingkat provinsi	
	1.2.6 Memfasilitasi percepatan pelaksanaan Perhutanan Sosial sesuai ketentuan perundangan (pemetaan partisipatif, konsultasi masyarakat, perencanaan pengelolaan)	
	1.2.7. Pendampingi RKPS/RKU, KUPS, serta berbagai mekanisme lain yang mendukung pengelolaan berkelanjutan termasuk dalam NEK	

Intervensi	Aktivitas	Indikator
1.3. Penetapan prioritas area restorasi gambut dan lahan terdegradasi	1.3.1 Mengharmonisasikan peta tata ruang, ekosistem gambut, dan lindung yang terkait	1. Luas area gambut yang diprioritaskan untuk restorasi bertambah(ha) 2. Peta restorasi terintegrasi tersedia 3. Luas agroforestri pada lahan bekas kebakaran yang direhabilitasi bertambah (ha) 4. Luas restorasi ekosistem gambut per KHG bertambah 5. Tinggi muka air gambut tidak kurang dari 40 cm
	1.3.2 Melakukan perencanaan restorasi sesuai fungsi lahan dan tipe ekosistem (tautan Strategi 6)	
	1.3.3 Memprioritaskan area assisted regeneration di lahan karet dan kopi terdegradasi menjadi agroforestri sesuai RTRW	
1.4. Rehabilitasi dan reklamasi area pertambangan pada saat eksplorasi dan eksploitasi	1.4.1 Melaksanakan program pemulihan pascatambang: reklamasi lahan bekas tambang, program sosial-budaya-ekonomi, dan pemeliharaan hasil reklamasi	1. Luas lahan bekas tambang yang direklamasi dan direhabilitasi bertambah (ha) 2. Persentase perusahaan tambang yang memenuhi kewajiban pemulihan pascatambang bertambah
	1.4.2 Melakukan monitoring dan evaluasi berkala program pascatambang terhadap ketaatan peraturan	
1.5. Alokasi perluasan terbatas lahan kopi di areal yang sesuai dan sertifikasi lahan kopi	1.5.1 Melakukan pemetaan lahan potensial untuk pengembangan budidaya kopi berbasis kesesuaian lahan	1. Luas lahan kopi yang dialokasikan di areal yang sesuai (ha) 2. Jumlah petani kopi yang memiliki sertifikasi lahan 3. Kontribusi sektor kopi terhadap PDRB industri pengolahan
	1.5.2 Mengalokasikan dan menetapkan area lahan budidaya kopi sesuai hasil pemetaan kesesuaian lahan	
1.6. lokasi revitalisasi kebun karet tua	1.6.1 Memetakan distribusi kebun karet tua dan menetapkan prioritas revitalisasi dan peremajaan	1. Luas kebun karet tua yang akan direvitalisasi/diremajakan dipetakan (ha) 2. Persentase peningkatan produktivitas karet setelah peremajaan 3. Jumlah petani yang menerima manfaat program revitalisasi karet

Intervensi	Aktivitas	Indikator
1.7. Moratorium ekspansi kelapa sawit di lahan gambut dan kawasan hutan	1.7.1 Memantau dan mengevaluasi pengembangan perkebunan sawit di lahan gambut serta penegakan hukumnya secara berkala	1. Luas ekspansi sawit baru di lahan gambut fungsi lindung tidak bertambah (target: nol ha) 2. Jumlah pelanggaran izin sawit di lahan gambut fungsi lindung dan di kawasan hutan yang ditindaklanjuti bertambah 3. Luas ekspansi sawit baru di kawasan hutan tidak bertambah (target: nol ha) 4. Penurunan emisi gambut akibat moratorium
	1.7.2 Memantau dan mengevaluasi pengembangan perkebunan sawit di kawasan hutan serta penegakan hukumnya secara berkala	
1.8. Penetapan dan pengelolaan koridor satwa liar dan areal preservasi: (i) koridor ekologi antar kawasan konservasi, (ii) areal preservasi di dalam/luar kawasan hutan, (iii) pengelolaan konflik manusia-satwa liar	1.8.1 Melakukan kajian dan pemetaan koridor ekologi prioritas berdasarkan distribusi satwa kunci (harimau, gajah)	1. Luas koridor satwa yang ditetapkan dan dilindungi (ha) 2. Penurunan insiden konflik manusia-satwa liar 3. Indeks DIFA (keanekaragaman hayati) meningkat
	1.8.2 Menetapkan areal preservasi di luar kawasan hutan (APL) melalui peraturan gubernur/daerah di area penyangga koridor satwa	
	1.8.3 Membangun sistem pengelolaan konflik manusia-satwa liar terpadu: unit respons cepat, sistem peringatan dini, pemberdayaan masyarakat lokal, dan skema kompensasi kerugian	
1.9. Perlindungan dan pengelolaan mangrove, estuari, rawa pasang surut, dan karbon biru sebagai bagian tata ruang darat-pesisir.	1.9.1 Memetakan mangrove eksisting, potensi rehabilitasi, status kawasan/APL, tambak, abrasi, sedimentasi, dan koneksi hidrologis dengan gambut-riparian. 1.9.2 Mengintegrasikan mangrove ke RTRW/RZWP3K/RKPD, memperkuat KKMD/FKPMD, menetapkan zona no-conversion, dan membangun model usaha masyarakat seperti silvofishery/ekowisata rendah dampak. 1.9.3 Menyiapkan baseline karbon biru dan MRV sederhana untuk opsi PJL/NEK sesuai aturan nasional.	1. Luas mangrove terlindungi dan/atau direhabilitasi (ha). 2. % mangrove di luar kawasan konservasi yang memiliki instrumen perlindungan/ pengelolaan. 3. Baseline karbon biru dan sistem MRV tersedia. 4. Jumlah kelompok pesisir memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan mangrove berkelanjutan.

Intervensi	Aktivitas	Indikator
1.10. Pengendalian risiko banjir, sedimentasi, dan kualitas air dari DAS Musi hingga rawa-pesisir.	1.10.1 Memetakan hotspot banjir, sedimentasi, erosi riparian, dan pencemaran air lintas kabupaten. 1.10.2 Memulihkan sempadan sungai, rawa, dan area resapan dengan nature-based solutions. 1.10.3 Menghubungkan informasi BMKG/early warning dengan perencanaan ruang dan operasi infrastruktur.	1. Luas riparian/area resapan dipulihkan bertambah (ha). 2. Jumlah lokasi banjir berulang yang ditangani berbasis DAS bertambah. 3. Kualitas air/TSS membaik pada sungai prioritas. 4. Sistem peringatan dini banjir-karhutla terhubung dan diterapkan oleh OPD/desa.

Strategi 2. Akses Masyarakat terhadap Modal Penghidupan (*Livelihood Capital*)

Intervensi	Aktivitas	Indikator
2.1. Optimalisasi Perhutanan Sosial	2.1.1 Pembentukan dan penguatan kelompok tani/ koperasi masyarakat di desa sasaran program Perhutanan Sosial	1. Persentase kelompok perhutanan sosial (KUPS) yang meningkat kelasnya bertambah 2. Jumlah kelompok tani/koperasi yang terbentuk dan aktif bertambah 3. Jumlah kelompok PS yang memiliki PKPS bertambah 4. Tersediannya panduan monitoring dan evaluasi untuk keberlanjutan
	2.1.2 Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja	
	2.1.3 Membuat panduan monitoring dan evaluasi keberlangsungan	
2.2. Sertifikasi lahan yang mudah dan terjangkau	2.2.1 Membuat kebijakan percepatan pendaftaran untuk sertifikasi tanah secara cepat, mudah, murah, dan aman	1. Indeks tertib administrasi pertanahan meningkat 2. Jumlah sertifikat tanah yang diterbitkan untuk masyarakat desa tertinggal bertambah 3. Persentase desa yang telah menyelesaikan pendaftaran untuk sertifikasi tanah meningkat
	2.2.2 Memfasilitasi masyarakat desa tertinggal untuk mendaftarkan sertifikasi tanah kepada PPAT setempat dengan pendampingan kepala desa/lurah	

Intervensi	Aktivitas	Indikator
2.3 Kelembagaan Pertanian dan Kehutanan yang kokoh	2.3.1 Meningkatkan pendampingan masyarakat desa tepat guna	1. Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya bertambah 2. Persentase kelompok tani yang aktif berkegiatan kolektif meningkat 3. Peningkatan partisipasi perempuan tani dan pemuda dalam organisasi tani 4. Jumlah kelompok champion yang menjadi role model pengelolaan lahan berkelanjutan bertambah
	2.3.2 Menyadartahukan masyarakat dan aparat desa tentang kemitraan dengan LSM dan sektor swasta	
	2.3.3 Mendorong kegiatan kolektif/gotong-royong di tingkat masyarakat desa	
	2.3.4 Meningkatkan partisipasi perempuan tani dan generasi muda dalam berorganisasi	
	2.3.5 Mendukung kelompok champion sebagai role model pengelolaan lahan berkelanjutan	
2.4. Resolusi konflik lahan	2.4.1 Identifikasi tipologi dan kategorisasi konflik lahan berdasarkan regulasi yang berlaku	1. Jumlah kasus konflik lahan yang terselesaikan bertambah 2. Peta sebaran konflik lahan tersedia dan mutakhir 3. Jumlah perjanjian penyelesaian konflik yang disepakati bertambah
	2.4.2 Membuat kajian kasus pertanahan dan peta sebaran konflik lahan	
	2.4.3 Membentuk kelompok kerja kemitraan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah	
	2.4.4 Menguatkan layanan pengaduan, penanganan, dan dokumentasi kasus konflik lahan	
	2.4.5 Memfasilitasi mediasi dan penyelesaian konflik secara partisipatif	
2.5. Penyuluhan pertanian yang tepat sasaran dan tepat guna	2.5.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluh dengan spesialisasi keahlian sesuai komoditas lokal	1. Persentase jumlah penyuluh pertanian meningkat 2% per tahun 2. Persentase jumlah kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi meningkat 10% 3. Jumlah kegiatan penyuluhan meningkat 4. Anggaran operasional yang dialokasikan untuk penyuluhan meningkat 3. Jumlah kemitraan usaha tani yang terjalin meningkat
	2.5.2 Meningkatkan anggaran operasional dan insentif kinerja sektor penyuluhan	
	2.5.3 Memperbaiki kelembagaan dan mengevaluasi kinerja Badan Penyuluh secara berkala	

Intervensi	Aktivitas	Indikator
2.6. Desa Mandiri Energi berbasis bioenergi	2.6.1 Mengkaji potensi bioenergi di tingkat desa (biomassa, biogas, bahan bakar nabati)	1. Persentase desa berlistrik: dari 99,26% (2024) meningkat menjadi 100% (2030) 2. Porsi EBT dalam bauran energi primer: dari 23,15% (2024) meningkat menjadi 25,7% (2030) 3. Jumlah desa yang memiliki infrastruktur bioenergi mandiri bertambah
	2.6.2 Menjamin pendanaan pembangunan infrastruktur bioenergi desa	
	2.6.3 Menyadartahukan dan melatih masyarakat serta aparat desa tentang pemanfaatan bioenergi	
	2.6.4 Memfasilitasi pemeliharaan dan keberlanjutan infrastruktur bioenergi di tingkat desa	
2.7. Lembaga keuangan desa mandiri	2.7.1 Melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan untuk meningkatkan akses layanan perbankan di tingkat desa	1. Jumlah desa yang memiliki akses layanan perbankan atau kelembagaan keuangan aktif meningkat 2. Persentase petani yang memanfaatkan fasilitas kredit usaha tani bertambah 3. Volume transaksi keuangan desa melalui lembaga formal bertambah
	2.7.2 Menyadartahukan manfaat fasilitas perbankan dan kredit mikro untuk peningkatan usaha tani	
2.8 Penguatan modal penghidupan masyarakat pesisir, rawa, dan gambut yang rentan iklim.	2.8.1 Mengembangkan usaha paludikultur, perikanan rawa, silvofishery mangrove, HHBK, dan ekowisata rendah dampak. 2.8.2 Menyediakan pelatihan bisnis, akses pasar, koperasi, dan perlindungan sosial adaptif bagi kelompok miskin, perempuan, dan pemuda. 2.8.3 Menghubungkan usaha dengan skema desa bebas api, PJL, dan pembiayaan hijau.	1. Jumlah usaha di daerah rawa/pesisir/gambut berkelanjutan yang aktif bertambah 2. Peningkatan pendapatan rumah tangga sasaran. 3. Jumlah perempuan/pemuda sebagai pengurus/anggota usaha bertambah. 4. Penurunan praktik pembakaran/sonor di desa sasaran.
2.9 Asuransi iklim dan perlindungan sosial adaptif untuk petani kecil, pekebun, dan masyarakat pesisir.	2.9.1 Mengembangkan paket asuransi gagal panen/ iklim, dana kontinjensi desa, dan early action berbasis prakiraan iklim. 2.9.2 Mengintegrasikan data kemiskinan, risiko banjir/ kekeringan/karhutla, dan kelembagaan petani. 2.9.3 Menyusun protokol dukungan pascabencana untuk menjaga petani tidak menjual aset produktif.	1. Jumlah petani/nelayan terlindungi asuransi/skema adaptif bertambah 2. Nilai klaim/dukungan tersalurkan tepat waktu meningkat. 3. Penurunan kerugian produksi akibat iklim. 4. Jumlah desa yang memiliki protokol early action bertambah.

Strategi 3. Peningkatan Produktivitas dan Manfaat dari Satu Unit Area

Intervensi	Aktivitas	Indikator
3.1. Budidaya padi irigasi rendah emisi dan terpadu dengan peternakan untuk pengadaan pupuk kandang	3.1.1 Membentuk kelompok kerja lintas sektor	1. Luas pertanian padi rendah emisi yang dikembangkan bertambah (ha) 2. Penurunan emisi GRK dari sektor padi (ton CO2e) 3. Produktivitas padi (ton GKG/ha) meningkat
	3.1.2 Membuat pemetaan outcome partisipatif bersama pemangku kepentingan	
	3.1.3 Membangun demplot pertanian varietas padi rendah emisi	
	3.1.4 Melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada petani tentang varietas padi rendah emisi dan sistem irigasi hemat air	
	3.1.5 Menyediakan subsidi dan distribusi bibit padi rendah emisi bersertifikat	
3.2. Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dan diversifikasi kopi agroforestri dengan ternak, teknik grafting, pemupukan berimbang, serta panen dan pascapanen berkualitas	3.2.1 Melakukan penyuluhan GAP dan diversifikasi agroforestri kopi-ternak kambing oleh penyuluh bersertifikasi	1. Penyuluhan GAP dan diversifikasi agroforestri kopi-ternak kambing dilakukan oleh penyuluh bersertifikat Jumlah petani yang mengadopsi GAP dan sistem agroforestri kopi 2. Peningkatan produktivitas dan pendapatan petani kopi (%) 3. Luas agroforestri kopi yang dikembangkan (ha)
	3.2.2 Membangun demplot agroforestri kopi kombinasi ternak kambing, pembuatan kompos, dan strip rumput penahan erosi	
	3.2.3 Menguatkan koperasi Sarana Produksi Pertanian (Saprodi) untuk mendukung adopsi GAP	
3.3. Revitalisasi dan peremajaan karet menggunakan bibit berkualitas produktivitas tinggi, GAP, dan pemupukan berimbang	3.3.1 Melakukan kajian kombinasi agroforestri karet dengan tanaman sela produktif dan skema bagi hasil yang saling menguntungkan	1. Persentase peningkatan produksi karet: dari 0,46% (2024) menjadi 0,114% (2030) 2. Jumlah petani yang menggunakan bibit unggul bersertifikat dan mengintegrasikan tanaman sela meningkat 3. Luas agroforestri karet dengan tanaman sela yang dikembangkan meningkat (ha) 4. Jumlah kebun bibit rakyat yang bersertifikat meningkat
	3.3.2 Melakukan penyuluhan tentang GAP budidaya karet kepada kelompok tani	
	3.3.3 Menjamin pasokan dan distribusi bibit unggul karet bersertifikat dan tanaman sela secara merata	
	3.3.4 Memfasilitasi sertifikasi kebun bibit karet rakyat dan peningkatan kualitas pembibitan lokal	
	3.3.5 Menjamin ketersediaan pupuk terjangkau disertai informasi pemupukan berimbang dan peralatan panen	

Intervensi	Aktivitas	Indikator
3.4. Intensifikasi budidaya kelapa sawit berkualitas	3.4.1 Menguatkan bisnis pembibitan kelapa sawit berkualitas tinggi dan bersertifikat oleh masyarakat	1. Persentase peningkatan produksi kelapa sawit 2. Jumlah petani sawit yang menggunakan bibit bersertifikat meningkat 3. Luas kebun sawit yang menerapkan ISPO/RSPO meningkat
	3.4.2 Melaksanakan program replanting dan pembinaan kebun plasma untuk mencapai standar ISPO/RSPO	
	3.4.3 Mendorong opsi agroforestri sawit dengan tanaman komoditas dan ternak (sapi) terutama untuk kebun di atas 8 tahun	
3.5. Program multi usaha kehutanan di areal HTI (zona tanaman kehidupan)	3.5.1 Melakukan penyadartahuan dan penyuluhan konsep tanaman kehidupan serta skema pelaksanaannya bagi masyarakat lokal	1. Luas agroforestri di lahan terdegradasi dalam areal HTI (ha) 2. Jumlah kelompok kemitraan masyarakat-HTI yang terbentuk 3. Peningkatan pendapatan masyarakat dari program tanaman kehidupan
	3.5.2 Pemetaan lahan zona tanaman kehidupan secara partisipatif	
	3.5.3 Melakukan kajian kondisi sosial-ekonomi masyarakat untuk perencanaan zona tanaman kehidupan	
	3.5.4 Melakukan studi opsi agroforestri dan bagi hasil tanaman kayu produktif sesuai kondisi lokal	
	3.5.5 Membuat perjanjian kemitraan mengikat antara masyarakat dan HTI, termasuk indikator M&E	
	3.5.6 Melakukan transfer teknologi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dan sistem pencegahan kebakaran hutan bersama masyarakat	
	3.5.7 Mendukung pemasaran dan pengelolaan produk agroforestri	
3.6. Mendorong percepatan pendaftaran pekebun rakyat	3.6.1 Melakukan percepatan pendataan Surat Tanda Daftar Budidaya elektronik (e-STDB)	1. Proporsi kelompok pekebun yang memiliki e-STDB meningkat 2. Jumlah kegiatan bersama dengan para pihak untuk mempercepat pendataan meningkat
	3.6.2 Melakukan kolaborasi bersama antara penyuluh, asosiasi pekebun, perusahaan/off-taker dan mitra pembangunan untuk mempercepat pendataan	
	3.6.3 Sosialisasi e-STDB dan IYB di kabupaten/kota	

Intervensi	Aktivitas	Indikator
3.7 Sistem produksi gambut dan rawa yang produktif, rendah emisi, dan tidak memperdalam drainase.	3.7.1 Melakukan penataan pengembangan komoditas di lahan basah/paludikultur, perikanan rawa, dan agroforestri gambut sesuai tinggi muka air. 3.7.2 Mengembangkan demplot dan pembibitan 3.7.3 Melarang paket intensifikasi yang mensyaratkan pengeringan gambut dalam	1. Luas lahan basah/paludikultur, perikanan rawa dan agroforestry di lahan gambut fungsi budidaya bertambah (ha). 2. Jumlah demplot dan pembibitan gambut. 2. Tinggi muka air di lahan gambut tetap terjaga tidak kurang dari 40 cm. 3. Pendapatan petani dari budidaya di lahan basah/paludikultur, perikanan rawa dan agroforestry di lahan gambut fungsi budidaya meningkat. 4. Emisi gambut dan hotspot turun. 5. Luas lahan gambut yang dikeringkan berkurang
3.8 Ekonomi sirkular agroindustri untuk jerami, POME, limbah karet, kopi, peternakan, dan biomassa desa.	3.8.1 Memetakan aliran limbah agroindustri dan potensi pemanfaatan lokal. 3.8.2 Mengembangkan kompos, biogas, biochar, pakan, energi panas/pengeringan, dan bahan baku industri kecil. 3.8.3 Menetapkan standar lingkungan, kelayakan ekonomi, dan pengurangan emisi.	1. Aliran limbah agroindustry dan potensi pemanfaatannya dipetakan. 2. Jumlah limbah yang dimanfaatkan per tahun meningkat 3. Emisi metana/limbah turun. 4. Jumlah unit usaha sirkular aktif bertambah 5. Standar lingkungan, kelayakan ekonomi dan pengurangan emisi ditetapkan. 6. Nilai tambah dari limbah meningkat.

Strategi 4. Peningkatan Rantai Nilai dengan Pembagian Manfaat yang Adil

Intervensi	Aktivitas	Indikator
4.1. Pengembangan industri hilir kopi	4.1.1 Mengembangkan database lokasi dan informasi panen raya kopi untuk keperluan investasi bisnis	1. Jumlah pabrik/unit pengolahan kopi tersertifikasi yang dibangun bertambah 2. Jumlah koperasi/badan usaha kopi berbasis komunitas yang beroperasi dan mengolah kualitas biji kopi premium bertambah 3. Database lokasi dan informasi waktu panen raya kopi tersedia 4. Hasil studi kelayakan industri hilir kopi berbasis masyarakat tersedia 5. Terjalinnya kemitraan antara sektor swasta dengan masyarakat dalam usaha kopi dan transfer teknologi pengolahan 6. Kopi dengan indikasi geografis didaftarkan
	4.1.2 Melakukan studi kelayakan industri kopi hilir berbasis masyarakat	
	4.1.3 Memfasilitasi kemitraan antara sektor swasta dan masyarakat, termasuk transfer teknologi pengolahan	
	4.1.4 Membentuk badan usaha/koperasi yang mengolah buah kopi merah panen untuk kualitas biji standar premium	
	4.1.5 Mendaftarkan komoditas kopi dengan indikasi geografis (tautan Strategi 7 intervensi 7.6)	
	4.1.6 Membangun pabrik produk turunan kopi tersertifikasi (SNI, BPOM) yang inovatif	
4.2. Peningkatan kuantitas dan kualitas pasar lelang karet (UPPB) sebagai simpul suplai karet bersih	4.2.1 Meningkatkan peran kelompok tani dalam mekanisme pasar UPPB melalui peningkatan kapasitas dan kejelasan juklak/juknis	1. Peningkatan harga karet yang diterima petani (%) 2. Jumlah unit UPPB aktif yang memenuhi standar kualitas bertambah 3. Jumlah kelompok tani yang berperan aktif dalam menanisme pasar UPPB bertambah 4. Juklak/juknis yang jelas tersedia dan tersosialisasi 5. Sistem reward bagi kelompok tani/anggota aktif sebagai bagian dari manajemen UPPB diterapkan 6. Monitoring pasar lelang diterapkan 7. Informasi mengenai jaringan pembeli potensial tersedia 8. Regulasi mutu karet bersih diterapkan
	4.2.2 Meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas UPPB sesuai kebutuhan setempat	
	4.2.3 Memperbaiki sistem manajemen UPPB dengan memperkenalkan sistem reward bagi kelompok/anggota aktif	
	4.2.4 Melakukan pengawasan pasar lelang untuk menghindari praktik ilegal dan monopoli harga	
	4.2.5 Mengembangkan jaringan kepada pembeli potensial dan menegakkan regulasi mutu karet bersih	

Intervensi	Aktivitas	Indikator
4.3. Pengembangan usaha produk turunan karet yang melibatkan petani karet sebagai investor	4.3.1 Melakukan studi kelayakan teknologi pengolahan karet tepat guna	1. Jumlah unit usaha/pabrik produk turunan karet yang dibangun bertambah 2. Jumlah petani karet yang menjadi pemegang saham bertambah 3. Peningkatan nilai tambah produk karet (% terhadap harga bahan baku) 4. Hasil studi kelayakan teknologi pengolahan karet tepan guna tersedia 5. Terbentuk hubungan kemitraan sektor swasta dengan masyarakat dan akses ke modal usaha tersedia
	4.3.2 Memfasilitasi kemitraan sektor swasta-masyarakat, termasuk akses perbankan untuk modal usaha	
	4.3.3 Mengembangkan skema investasi dengan petani karet sebagai pemegang saham	
	4.3.4 Membangun pabrik produk turunan karet sesuai hasil kajian kelayakan	
4.4. Pembangunan 'mini mill' kelapa sawit yang dikelola oleh petani kecil	4.4.1 Melakukan studi kelayakan pembangunan mini mill kelapa sawit	1. Persentase peningkatan produksi kelapa sawit 2. Jumlah mini mill sawit yang dibangun dan memenuhi standar rantai pasok CPO bertambah 3. Jumlah petani sawit yang menjadi pemegang saham mini mill bertambah 4. Hasil studi kelayakan pembangunan mini mill tersedia 5. Terjalinnya kemitraan antara sektor swasta dengan petani dalam pengelolaan mini mill
	4.4.2 Memfasilitasi kemitraan antara sektor swasta dan masyarakat dalam pengelolaan mini mill	
	4.4.3 Mengembangkan skema investasi bisnis dengan petani sebagai pemegang saham, didampingi pemerintah	
	4.4.4 Membangun mini mill kelapa sawit yang memenuhi standar kualitas rantai pasok CPO	
	4.4.5 Memperbaiki teknologi budidaya kelapa sawit dan pemanenan	

Intervensi	Aktivitas	Indikator
4.5 Sistem traceability dan rantai pasok bebas deforestasi untuk sawit, karet, kopi, dan kayu.	4.5.1 Membangun hub data geolokasi kebun, legalitas, sertifikasi, dan riwayat tutupan lahan. 4.5.2 Menetapkan protokol chain-of-custody dari kebun/UPPB/ koperasi sampai pabrik/buyer. 4.5.3 Menyediakan layanan uji kesiapan EUDR/ISPO/SVLK/ sertifikasi bagi koperasi dan perusahaan.	1. % volume komoditas prioritas yang traceable meningkat 2. Jumlah pemasok lulus uji legalitas dan bebas deforestasi bertambah 3. Jumlah koperasi/perusahaan siap audit pasar bertambah. 4. Penolakan pasar akibat legalitas/traceability menurun. 5. Hub data geolokasi kebun, legalitas, sertifikasi dan riwayat tutupan lahan tersedia 6. Protokol chain-of-custody dari kebun/UPPB/ koperasi sampai pabrik/buyer ditetapkan dan diterapkan 7. Layanan uji kesiapan EUDR/ISPO/SVLK/ sertifikasi bagi koperasi dan perusahaan tersedia
4.6 Hilirisasi hijau berbasis LCA (Life Cycle Assesement) sederhana, energi bersih, dan pembagian manfaat lokal.	4.6.1 Menilai jejak karbon/air/limbah pada produk hilir prioritas. 4.6.2 Mengembangkan energi bersih, efisiensi proses, dan standar mutu. 4.6.3 Memastikan skema kepemilikan/koperasi yang membagi nilai tambah secara adil.	1. Jumlah produk hilir rendah karbon bertambah 2. Intensitas energi/air/limbah per unit produk turun. 3. Proporsi nilai tambah yang diterima petani/ koperasi meningkat 4. Kontrak pasar produk hijau meningkat.

Strategi 5. Peningkatan Konektivitas dan *Economy of Scale*

Intervensi	Aktivitas	Indikator
5.1. Pengembangan jaringan transportasi di area sentra komoditas menuju fasilitas pemrosesan atau pasar	5.1.1 Melakukan identifikasi kebutuhan jaringan jalan untuk menghubungkan sentra komoditas ke fasilitas pemrosesan atau pasar	1. Panjang jalan yang dibangun/diperbaiki untuk menghubungkan sentra komoditas (km) bertambah 2. Kebutuhan jaringan jalan untuk menghubungkan sentra komoditas ke fasilitas pemrosesan atau pasar teridentifikasi 3. Hasil studi kelayakan pembangunan infrastruktur transportasi prioritas tersedia
	5.1.2 Melakukan studi kelayakan pembangunan infrastruktur transportasi prioritas	
	5.1.3 Membangun dan memelihara jaringan jalan yang menghubungkan sentra komoditas dengan pusat industri dan pasar	
5.2. Investasi industri hilir kopi dan perbaikan infrastruktur transportasi menghubungkan rantai nilai suplai dengan industri strategis	5.2.1 Membangun infrastruktur agribisnis kopi berbasis IT yang memadukan petani, manajer, pengusaha, dan perusahaan	1. Rasio sektor industri pengolahan terhadap PDRB meningkat 2. Proporsi jumlah industri kecil dan menengah kopi di tingkat provinsi yang bermitra dengan sektor swasta meningkat 3. Terbangunnya infrastruktur agribisnis kopi berbasis digital 4. Hasil studi kelayakan investasi hilir kopi tersedia 5. Panjang jaringan jalan produksi di kebun kopi, terutama untuk area terpencil yang sulit diakses bertambah
	5.2.2 Melakukan studi kelayakan investasi hilir kopi	
	5.2.3 Memfasilitasi kemitraan antara sektor swasta dan masyarakat untuk pengembangan hilir kopi	
	5.2.4 Membangun jaringan jalan produksi di kebun kopi, terutama untuk area terpencil yang sulit diakses	
5.3. Investasi industri hilir karet dan perbaikan infrastruktur transportasi menghubungkan rantai nilai suplai crumb rubber dengan industri strategis	5.3.1 Mengidentifikasi kebutuhan jaringan jalan untuk menghubungkan rantai nilai suplai crumb rubber ke industri strategis	1. Peningkatan permintaan industri berbasis karet di dalam Sumatra Selatan (%) 2. Panjang jalan yang menghubungkan sentra karet dengan kawasan industri (km) bertambah 3. Peningkatan nilai ekspor produk karet olahan 4. Kebutuhan jaringan jalan untuk menghubungkan rantai nilai suplai crumb rubber ke industri strategis teridentifikasi 5. Hasil studi kelayakan pembangunan jalan sesuai kebutuhan identifikasi tersedia
	5.3.2 Melakukan studi kelayakan pembangunan jalan sesuai kebutuhan identifikasi	
	5.3.3 Membangun jaringan jalan yang menghubungkan sentra penghasil karet dengan kawasan industri strategis	

Intervensi	Aktivitas	Indikator
5.4. Investasi industri hilir sawit dan perbaikan infrastruktur transportasi menghubungkan rantai nilai suplai CPO dengan industri strategis	5.4.1 Mengidentifikasi kebutuhan jaringan jalan untuk menghubungkan rantai nilai suplai CPO ke industri strategis 5.4.2 Melakukan studi kelayakan pembangunan jalan prioritas untuk kawasan industri sawit 5.4.3 Membangun jaringan jalan yang menghubungkan sentra penghasil sawit dengan kawasan industri strategis	1. Peningkatan nilai ekspor sektor industri pangan/ sawit (%) 2. Panjang jalan yang menghubungkan sentra sawit dengan kawasan industri (km) bertambah 3. Kebutuhan jaringan jalan untuk menghubungkan rantai nilai suplai CPO ke industri strategis teridentifikasi 4. Hasil studi kelayakan pembangunan jalan prioritas untuk kawasan industri sawit
5.5 Pengembangan infrastruktur logistik rendah emisi dan tahan iklim untuk komoditas hijau.	5.5.1 Menilai opsi jalan, sungai, rel, gudang, cold/dry storage, dan rute kolektif berdasarkan biaya, emisi, dan risiko banjir. 5.5.2 Memprioritaskan perbaikan infrastruktur eksisting, bukan pembukaan akses baru ke kawasan rentan. 5.5.3 Mengintegrasikan logistik dengan koperasi/UPPB/ BUMDes, dan system traceability.	1. Biaya logistik per ton turun. 2. Emisi transport per ton-km turun. 3. Kerugian pascapanen turun. 4. % infrastruktur baru lulus screening lingkungan-sosial. 5. Hasil penilaian opsi jalan, sungai, rel, gudang, cold/ dry storage, dan rute kolektif berdasarkan biaya, emisi, dan risiko banjir 6. Jumlah infrastruktur yang diperbaiki bertambah atau jumlah pembukaan akses baru berkurang
5.6 Pengembaangan infrastruktur digital rantai nilai yang meliputi geolokasi, data mutu, transaksi, dan pembiayaan.	5.6.1 Mengembangkan aplikasi/data hub untuk e-STDB, mutu, lot, transaksi, pembiayaan, dan sertifikasi. 5.6.2 Melatih koperasi/UPPB/KUPS menggunakan pencatatan digital. 5.6.3 Menyusun protokol perlindungan data petani dan interoperabilitas OPD.	1. Jumlah koperasi/UPPB/KUPS menggunakan data digital bertambah 2. % transaksi/lot yang tercatat bertambah. 3. Jumlah petani yang memperoleh pembiayaan karena data lengkap bertambah. 4. Insiden data ganda/tidak valid menurun. 5. Aplikasi/data hub untuk e-STDB, mutu, lot, transaksi, pembiayaan, dan sertifikasi tersedia 6. Protokol perlindungan data petani dan interoperabilitas OPD tersedia

Strategi 6. Restorasi Lanskap dan Hutan secara Efektif

Intervensi	Aktivitas	Indikator
6.1. Pendanaan, kebijakan, dan kemitraan yang mendukung program restorasi	6.1.1 Mengalokasikan pendanaan secara reguler dari APBD untuk kegiatan restorasi	1. Jumlah alokasi APBD untuk kegiatan restorasi per tahun (Rp) bertambah/tersedia 2. Jumlah kemitraan nasional/internasional aktif untuk restorasi bertambah 3. Jumlah praktik terbaik restorasi masyarakat yang diidentifikasi, didokumentasikan dan direplikasi bertambah
	6.1.2 Menjalin kemitraan dengan mitra internasional, nasional, dan lokal untuk kegiatan restorasi, termasuk pendanaannya	
	6.1.3 Mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mendiseminasikan praktik terbaik restorasi oleh masyarakat	
6.2. Restorasi lahan dengan sistem agroforestri (kopi dan karet)	6.2.1 Melakukan perencanaan restorasi berbasis tata ruang (tautan Intervensi 1.4 dan 1.5)	1. Luas agroforestri kopi yang dikembangkan dari simple-coffee menjadi complex agroforestry (ha) meningkat 2. Peningkatan pendapatan petani dari sistem agroforestri (%) 3. Jumlah petani yang beralih ke sistem agroforestri kompleks bertambah 4. Rencana restorasi berbasis tata ruang tersedia 5. Hasil kajian sistem agroforestri yang sesuai kondisi lokal tersedia 6. Penyuluhan dan pelatihan kepada petani tentang sistem agroforestri kopi dan karet dilakukan 7. Pembibitan untuk komoditas agroforestri tersedia
	6.2.2 Melakukan kajian sistem agroforestri yang sesuai dengan kondisi lokal	
	6.2.3 Melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada petani tentang sistem agroforestri kopi dan karet	
	6.2.4 Membangun pembibitan untuk berbagai komoditas agroforestri di tingkat desa	
6.5. Fasilitasi Suksesi alami areal HCV dan HCS	6.5.1 Mengamankan hutan HCV dan HCS dari gangguan: penjarahan, perambahan, dan kebakaran	1. Luas areal HCV dan HCS yang terlindungi dari gangguan (ha) bertambah 2. Recovery rate dan growth rate ekosistem HCV/HCS yang dipantau bertambah 3. Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengamanan kawasan bertambah
	6.5.2 Menyadartahukan masyarakat sekitar tentang pentingnya HCV dan HCS bagi kesehatan ekosistem	
	6.5.3 Melakukan pemantauan dan evaluasi recovery dan growth rate ekosistem secara berkala	

Intervensi	Aktivitas	Indikator
6.6 Rehabilitasi areal HCV dan HCS yang sudah terdegradasi	6.6.1 Melakukan identifikasi fungsi ekologi dan penyusunan rencana restorasi per areal	1. Luas areal HCV/HCS terdegradasi yang direhabilitasi (ha) bertambah 2. Keberhasilan penanaman dan assisted natural regeneration dengan spesies lokal meningkat (%) 3. Sistem monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi area HCN dan HCS tersedia dan terintegrasi ke dalam database lingkungan provinsi 4. Rencana restorasi per area tersedia
	6.6.2 Melakukan penanaman sesuai fungsi ekologi, termasuk metode assisted natural regeneration untuk spesies lokal	
	6.6.3 Membuat sistem monitoring dan evaluasi terintegrasi dengan database lingkungan provinsi	
6.7. Restorasi gambut	6.7.1 Mengalokasikan area gambut fungsi budidaya untuk petani miskin sesuai Peta Indikatif	1. Luas area gambut fungsi budidaya yang dialokasikan untuk petani miskin (ha) bertambah 2. Hasil kajian biaya-manfaat paludikultur tersedia 3. Penurunan emisi gambut akibat kegiatan restorasi (Mton CO2)
	6.7.2 Melakukan kajian biaya-manfaat opsi paludikultur untuk petani kecil di areal gambut fungsi budidaya sesuai kondisi setempat	
	6.7.3 Melakukan pemantauan emisi gambut pada area yang direstorasi	
6.8. Pengelolaan kebakaran hutan dan lahan terpadu	6.8.1 Memberdayakan masyarakat untuk pencegahan dan pemadaman kebakaran, termasuk pembinaan desa peduli api	1. Luas kebakaran hutan dan lahan per tahun (ha) menurun 2. Jumlah desa peduli api yang terbentuk dan aktif bertambah 3. Persentase titik panas (hotspot) yang ditindaklanjuti dalam 24 jam bertambah 4. Jumlah kejadian kebakaran yang ditindak-lanjuti bertambah 5. Luas penanaman vegetasi sekat bakar (ha), jumlah sekat kanal bertambah
	6.8.2 Menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan LSM untuk mendukung program desa peduli api	
	6.8.3 Melakukan penegakan hukum, pemantauan, dan evaluasi kebijakan 'zero burning'	
	6.8.4 Memfasilitasi berbagai skema pencegahan kebakaran: sekat bakar dengan tanaman tahan api, pembuatan kanal, modifikasi cuaca	

Intervensi	Aktivitas	Indikator
6.9 Restorasi mangrove dan ekosistem pesisir sebagai perlindungan pantai, biodiversitas, dan karbon biru.	6.9.1 Menetapkan prioritas restorasi berbasis hidrologi, sedimentasi, status lahan, dan kebutuhan masyarakat, bukan hanya penanaman bibit. 6.9.2 Mengembangkan perlindungan kawasan, rehabilitasi, silvofishery, ekowisata, dan patroli komunitas. 6.9.3 Memantau survival, akresi/sedimentasi, biodiversitas, dan stok karbon.	1. Luas mangrove yang direstorasi dengandan mencapai survival rate memadai bertambah 2. Area mangrove terlindungi dari konversi bertambah. 3. Stok karbon biru/MRV dan keragaman biodiversitas meningkat, akresi dan sedimentasi berkurang
6.10 Restorasi riparian dan konektivitas rawa-sungai-pesisir.	6.10.1 Memulihkan sempadan sungai prioritas dengan vegetasi lokal dan agroforestri konservasi. 6.10.2 Mengurangi sedimen, sampah, dan pencemar dari hulu ke hilir. 6.10.3 Menghubungkan restorasi riparian dengan koridor satwa dan pengurangan banjir.	1. Panjang/luas riparian dipulihkan bertambah. 2. TSS/pencemar menurun. 3. Kejadian banjir lokal menurun. 4. Konektivitas habitat meningkat.
6.11 MRV FOLU, gambut, dan karbon biru tingkat provinsi.	6.11.1 Menyusun sistem MRV terpadu untuk defor estasi, degradasi, restorasi, gambut, karhutla, mangrove, dan manfaat sosial. 6.11.2 Mengintegrasikan data remote sensing, plot lapangan, SRN-PPI, RPPEG, IYB, dan laporan kabupaten. 6.11.3 Menyediakan QA/QC dan publikasi capaian tahunan.	1. Sistem MRV GGP aktif. 2. Data emisi/serapan tahunan tersedia. 3. Jumlah proyek restorasi/karbon yang memiliki baseline dan monitoring bertambah. 4. Laporan capaian dapat diverifikasi.

Strategi 7. Insentif Jasa Lingkungan dan Pendanaan Inovatif Komoditas Berkelanjutan

Intervensi	Aktivitas	Indikator
7.1. Sertifikasi lanskap dan imbal/pembayaran jasa lingkungan untuk tata kelola DAS, gambut, dan keanekaragaman hayati	7.1.1 Melakukan kajian potensi sertifikasi lanskap dan mekanisme pembayaran jasa lingkungan, termasuk sumber dana dan tantangan	1. Jumlah skema pembayaran jasa lingkungan (PJL) yang berjalan di tingkat provinsi bertambah 2. Jumlah lembaga/badan independen pengelola dana lingkungan yang terbentuk bertambah 3. Luas kawasan yang masuk dalam sistem sertifikasi lanskap bertambah 4. Hasil kajian potensi sertifikasi lanskap dan mekanisme pembayaran jasa lingkungan, termasuk sumber dana dan tantangan tersedia 5. Sistem monitoring dan evaluasi jasa lingkungan tersedia 6. Jumlah kelompok tani penyedia jasa lingkungan bertambah
	7.1.2 Penyadartahuan dan promosi konsep jasa lingkungan untuk sektor swasta dan masyarakat lokal	
	7.1.3 Mengkoordinasikan pelatihan (ToT) bagi promotor dan verifikator skema pembiayaan jasa lingkungan	
	7.1.4 Mendetailkan peraturan terkait jasa lingkungan dan instrumen ekonomi untuk pembiayaan konservasi	
	7.1.5 Menyelaraskan rencana strategis lintas sektor untuk pembangunan rencana strategis pembiayaan jasa lingkungan	
	7.1.6 Menyusun sistem monitoring dan evaluasi jasa lingkungan (fungsi DAS, karbon, keanekaragaman hayati)	
	7.1.7 Memfasilitasi negosiasi antara penyedia jasa lingkungan dan penerima manfaat di tingkat sub-DAS	
	7.1.8 Menyiapkan dan melegalisasi Kelompok Tani Jasa Lingkungan di tingkat desa	
7.2. Fasilitasi Pasar komoditas air terkompensasi untuk suplai air berkelanjutan	7.2.1 Menganalisis praktik saat ini dan potensi pembagian manfaat jasa air, termasuk sumber dampak dan penghitungan kompensasi	1. Jumlah perjanjian kompensasi air yang disepakati antara hulu dan hilir bertambah 2. Peningkatan efisiensi kinerja PDAM dalam penyediaan air bersih (%) 3. Sistem monitoring kualitas dan kuantitas air sungai utama yang beroperasi tersedia dan diterapkan 4. Jumlah aktivitas usaha yang dikenai skema disinsentif berkurang
	7.2.2 Menegosiasikan kompensasi dan mekanisme pembagian manfaat antara penyedia dan penerima jasa air	
	7.2.3 Menerapkan sistem monitoring sebagai basis negosiasi dan pembaruan kontrak jasa air	
	7.2.4 Menilai dan meningkatkan efisiensi kinerja PDAM dalam penyediaan dan penyaluran air bersih	
	7.2.5 Mengembangkan mekanisme disinsentif (pajak lingkungan, retribusi) untuk aktivitas usaha yang mengancam kualitas jasa air	

Intervensi	Aktivitas	Indikator
7.3. Pengembangan pasar ekowisata dengan variasi alternatif tujuan wisata	7.3.1 Mengembangkan rencana ekowisata spesifik lokasi dan model bisnis untuk komunitas lokal	1. Jumlah desa wisata yang dikembangkan (kumulatif) bertambah 2. Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan per tahun meningkat 3. Kontribusi ekowisata terhadap pendapatan masyarakat lokal (%) meningkat
	7.3.2 Mengidentifikasi dampak lingkungan dan sosial dari pengembangan ekowisata	
	7.3.3 Mengembangkan rencana partisipatif dengan komunitas lokal tentang pengelolaan tempat ekowisata	
	7.3.4 Memperbaiki sistem tiket ekowisata dan mengidentifikasi mekanisme pembiayaan konservasi dari pendapatan ekowisata	
	7.3.5 Mengembangkan mekanisme disinsentif untuk aktivitas wisata yang mengancam kualitas jasa lingkungan	
7.4. Pengembangan pasar dan inisiatif karbon sukarela	7.4.1 Melakukan identifikasi lokasi potensial dan kajian gap kebijakan untuk implementasi pasar karbon sukarela di provinsi	1. Jumlah lokasi potensial pasar karbon sukarela yang teridentifikasi bertambah 2. Jumlah pemerintah daerah/LSM yang terlatih dalam monitoring dan pengukuran karbon bertambah
	7.4.2 Melakukan ToT monitoring dan pengukuran karbon di tingkat tapak untuk pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat	
	7.4.3 Mendukung LSM dalam memfasilitasi pengukuran karbon, pelibatan masyarakat, dan negosiasi pasar karbon sukarela	
7.5. Pengembangan imbal jasa lingkungan untuk mengubah perilaku petani sonor menjadi sistem agroforestri	7.5.1 Melakukan kajian nilai ekonomi dan fungsi ekologi perubahan sonor menjadi agroforestri	1. Jumlah petani sonor yang beralih ke sistem agroforestri bertambah 2. Hasil kajian mengenai nilai ekonomi jasa lingkungan dari konversi sonor ke agroforestri (Rp) tersedia 3. Jumlah BUMDes yang memfasilitasi kredit mikro untuk inisiasi agroforestri bertambah
	7.5.2 Memberikan kredit mikro dan kemitraan untuk inisiasi sistem agroforestri melalui BUMDes, Dana Desa, dan dana peduli api	
	7.5.3 Memberikan penyadartahuan kepada masyarakat mengenai dampak negatif sonor dan pentingnya agroforestri	

Intervensi	Aktivitas	Indikator
7.6. Membangun sistem sertifikasi komoditas dan jasa lingkungan dari perkebunan kopi	7.6.1 Mendukung dan mengintegrasikan program pembangunan pertanian di area potensial untuk sertifikasi kopi	1. Jumlah perkebunan kopi yang tersertifikasi (indikasi geografis/sertifikasi internasional) bertambah 2. Peningkatan harga kopi bersertifikasi dibandingkan kopi konvensional (%) 3. Luas perkebunan kopi agroforestri yang mendapat status legal dan insentif fiskal bertambah
	7.6.2 Memonitor indikator lingkungan, ekonomi, dan sosial untuk program sertifikasi kopi sebagai bagian dari database provinsi	
	7.6.3 Memfasilitasi akses pasar untuk kopi bersertifikasi sebagai kopi spesial/premium dengan indikasi geografis	
	7.6.4 Menyederhanakan administrasi sertifikasi lahan dan status legal perkebunan kopi yang mendukung fungsi ekologi	
	7.6.5 Mengembangkan dan mengintegrasikan indikator hijau dengan sistem keuangan agribisnis kopi	
7.7. Mendukung sertifikasi ISPO dan RSPO untuk perusahaan sawit dan petani kecil	7.7.1 Mendukung dan mengintegrasikan program pembangunan pertanian untuk areal berpotensi sertifikasi, khususnya petani kecil	1. Jumlah perusahaan sawit dan petani kecil yang tersertifikasi ISPO/RSPO bertambah 2. Persentase kebun sawit yang memenuhi standar praktik berkelanjutan meningkat 3. Peningkatan harga CPO bersertifikat dibandingkan CPO konvensional (%)
	7.7.2 Memonitor indikator lingkungan, ekonomi, dan sosial untuk program sertifikasi sebagai bagian database provinsi	
	7.7.3 Menyederhanakan administrasi sertifikasi lahan dan status legal perkebunan sawit yang mendukung fungsi ekologi	
	7.7.4 Mengaplikasikan sistem insentif (pengurangan pajak) bagi sektor swasta yang menerapkan praktik berkelanjutan	
	7.7.5 Mengembangkan dan mengintegrasikan indikator hijau untuk sistem keuangan agribisnis sawit	
7.8. Sertifikasi berstandar internasional untuk kayu	7.8.1 Melakukan analisis sistem perizinan dan sertifikasi kayu yang tumpang tindih, dan memberikan rekomendasi penyederhanaan	1. Jumlah perusahaan HTI yang memiliki sertifikasi internasional (FSC, SVLK, FLEGT) bertambah 2. Sistem perizinan HTI sebagai insentif sertifikasi berkelanjutan yang lebih sederhan tersedia 3. Jumlah perusahaan HTI yang menerima denda berkurang
	7.8.2 Menyederhanakan perizinan HTI sebagai insentif bagi perusahaan yang menerapkan sertifikasi berkelanjutan (SVLK, FLEGT, FSC)	
	7.8.3 Mengaplikasikan sistem insentif (pengurangan pajak) untuk perusahaan berkelanjutan dan disinsentif (denda) untuk pelanggar	
	7.8.4 Membangun dan mengintegrasikan indikator hijau untuk kredit keuangan agribisnis kehutanan	

Intervensi	Aktivitas	Indikator
7.9 Mendukung implementasi yurisdiksi berkelanjutan Mendukung tata kelola komoditas berkelanjutan berbasis indikator yurisdiksi	7.9.1 Memutakhirkan data komoditas berkelanjutan pada platform IYB	1. Proporsi kabupaten/kota di Sumatera Selatan dengan grade A dalam penilaian indikator yurisdiksi berkelanjutan bertambah 2. Persentase kelengkapan data IYB tahunan per kabupaten/kota di Sumatera Selatan bertambah
	7.9.2 Mengembangkan skema insentif untuk kabupaten/kota sesuai dengan kinerja capaian IYB	
	7.9.3 Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja IYB setiap kabupaten/kota	
7.10 Pembiayaan karbon biru dan jasa lingkungan mangrove yang patuh NEK/SRN.	7.10.1 Melakukan due diligence legalitas lahan, pemegang hak karbon, baseline, additionality, permanence, leakage, safeguard, dan benefit sharing. 7.10.2 Menyiapkan proyek mangrove/pesisir untuk SRN-PPI, PJL, BPDLH, CSR, atau offtake yang sesuai regulasi. 7.10.3 Menetapkan mekanisme pembagian manfaat komunitas dan pengaduan.	1. Jumlah proyek karbon biru/PJL yang siap registrasi bertambah 2. Volume emisi/serapan terverifikasi. 3. Nilai pembiayaan yang masuk ke masyarakat/ restorasi bertambah. 4. Benefit sharing dan grievance berjalan.
7.11 Climate budget tagging dan pipeline proyek hijau berbasis TKBI (Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia.	7.11.1 Menandai belanja APBD yang berkontribusi pada mitigasi, adaptasi, biodiversitas, restorasi, dan penghidupan hijau. 7.11.2 Menyusun daftar proyek bankable yang sesuai TKBI dan kebutuhan RPJPD/RPJMD/RPPEG. 7.11.3 Melakukan evaluasi efektivitas belanja berdasarkan outcome, bukan hanya serapan.	1. % belanja hijau tertagging. 2. Nilai pipeline proyek hijau bertambah. 3. Jumlah proyek yang memperoleh pembiayaan bertambah. 4. Outcome emisi/restorasi/penghidupan terukur.
7.12 Penyiapan insentif fiskal ekologis berbasis kinerja kabupaten/desa.	7.12.1 Mendesain TAKE/TAPE-like incentive untuk kabupaten/desa berdasarkan indikator deforestasi, karhutla, e-STDB, restorasi, konflik, sampah, dan perlindungan mangrove. 7.12.2 Menghubungkan insentif dengan IYB, RKPD, dan Dana Desa. 7.12.3 Membangun mekanisme verifikasi dan publikasi nilai kinerja.	1. Skema insentif fiskal ekologis berjalan. 2. Jumlah kabupaten/desa menerima insentif berbasis kinerja bertambah. 3. Perbaikan indikator deforestasi/karhutla/ restorasi. 4. Data kinerja dipublikasikan tahunan meningkat.

Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods (Land4Lives) in Indonesia atau #LahanUntukKehidupan adalah proyek lima tahun yang didanai oleh Global Affairs Canada, untuk tata kelola bentang lahan yang lebih baik, ketahanan pangan, kesetraan gender dan perubahan iklim. Pelaksanaan proyek mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

Landscape Alliance

Jl. CIFOR, Situ Gede Sindang Barang, Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia
Tel: +(62) 251 8625415 | landscapealliance.org/locations/asia/indonesia

Land4Lives
In partnership with Canada
LANDSCAPE ALLIANCE
CIFOR & ICRAF in action